



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip secara efektif dan efisien untuk terciptanya tertib pengelolaan arsip serta mendukung implementasi system informasi kearsipan dinamis terintegrasi, perlu diatur adanya kode klasifikasi arsip;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Pimpinan pencipta arsip perlu menetapkan Peraturan tentang Kode Klasifikasi Arsip;
- c. bahwa aturan terkait dengan kode klasifikasi arsip telah disempurnakan dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5071);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
7. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip.
8. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan arsip dinamis.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. mewujudkan kode klasifikasi arsip sebagai upaya untuk sinkronisasi informasi kearsipan antara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, dan ;
 - c. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan Kembali arsip.

BAB III KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 3

- (1) Klasifikasi arsip disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yang meliputi :
 - a. fungsi fasilitatif; dan
 - b. fungsi substantif.
- (2) Fungsi Fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan perangkat daerah.
- (3) Fungsi Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.
- (4) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.
- (5) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan dan penemuan kembali arsip.
- (6) Kode Klasifikasi Arsip tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 4

- (1) Tata cara klasifikasi merupakan hasil analisis fungsi dalam menyusun skema Klasifikasi Arsip yang terdiri dari jenjang fungsi yang disusun secara sistematis dan logis dari pengertian yang luas ke pengertian yang bersifat spesifik dan teknis.
- (2) Pengklasifikasi dilakukan berjenjang yakni terdiri dari beberapa kegiatan dan masing-masing kegiatan terdiri dari beberapa transaksi arsip seperti jenjang pertama adalah nama fungsi (primer), jenjang kedua nama kegiatan (sekunder) dan jenjang ketiga nama transaksi (tersier).

Pasal 5

- (1) Sistem Kode Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan bidang tugas, menggunakan sistem alfanumerik.
- (2) Skema Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut secara detail dan lengkap kerangka induk klasifikasi menjadi bentuk yang berjenjang yakni terdiri dari beberapa kegiatan dan masing-masing kegiatan terdiri dari beberapa transaksi seperti nomor urut, kode klasifikasi, judul pokok masalah, sub masalah dan sub-sub masalah.
- (3) Sistem Kode Klasifikasi Arsip dan Skema Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Kode Klasifikasi yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023 NOMOR 13

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

12/23
1/2

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 13 TAHUN 2023

TANGGAL : 5 Juni 2023

**TENTANG : KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA**

KODE KLASIFIKASI

- 000. UMUM**
- 100. PEMERINTAHAN**
- 200. POLITIK**
- 300. KEAMANAN DAN KETERTIBAN**
- 400. KESEJAHTERAAN RAKYAT**
- 500. PEREKONOMIAN**
- 600. PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN**
- 700. PENGAWASAN**
- 800. KEPEGAWAIAN**
- 900. KEUANGAN**

000. UMUM

00.1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN

- 00.1.1 Telekomunikasi
- 00.1.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 - 00.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
 - 00.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD
 - 00.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai
- 00.1.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri
 - 00.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
 - 00.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD
 - 00.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai
- 00.1.4 Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain : Permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya)
- 00.1.5 Rapat pimpinan, antara lain : Notulen/Risalah Rapat
- 00.1.6 Penyediaan Konsumsi
- 00.1.7 Pengurusan Kendaraan Dinas
 - 00.1.7.1 Pengurusan surat-surat Kendaraan Dinas
 - 00.1.7.2 Pemeliharaan dan Perbaikan
 - 00.1.7.3 Pengurusan Kehilangan dan Masalah Kendaraan
- 00.1.8 Pemeliharaan Gedung, Taman dan Kendaraan Kantor
 - 00.1.8.1 Pertamanan/Landscape
 - 00.1.8.2 Penghijauan
 - 00.1.8.3 Perbaikan Gedung
 - 00.1.8.4 Perbaikan Peralatan kantor
 - 00.1.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/Wisma
 - 00.1.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman
- 00.1.9 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer
 - 00.1.9.1 Perbaikan / Pemeliharaan
 - 00.1.9.2 Pemasangan
- 00.1.10 Ketertiban dan Keamanan
 - 00.1.10.1 Pengamanan, Penjagaan dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas
 - 00.1.10.2 Laporan Ketertiban dan Keamanan
- 00.1.11 Administrasi Pengelolaan Parkir
- 00.1.12 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya

00.2 PERLENGKAPAN

- 00.2.1 Inventarisasi dan Penyimpanan
 - 00.2.1.1 Data Hasil Inventarisasi dan Penyimpanan
 - 00.2.1.2 Laporan dan Evaluasi Inventarisasi dan Penyimpanan
- 00.2.2 Pemeliharaan Peralatan Kantor
 - 00.2.2.1 Data Hasil Pemeliharaan Kantor
 - 00.2.2.2 Laporan dan Evaluasi Pemeliharaan Kantor
- 00.2.3 Distribusi
 - 00.2.3.1 Barang Pakai Habis
 - 00.2.3.2 Barang Milik Daerah
- 00.2.4 Penghapusan barang Milik Daerah, antara lain : Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan hasil Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah termasuk didalamnya Proses Lelang Penghapusan
- 00.2.5 Pengelolaan Database Barang Milik Daerah

00.3 PENGADAAN

- 00.3.1 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (antara lain : Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Barang/Jasa, Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pengadaan, Penetapan Kebijakan Umum, Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)
- 00.3.2 Pengadaan langsung (antara lain : Persiapan Pemilihan Penyediaan, Pelaksanaan Pemilihan Penyediaan, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak)
- 00.3.3 Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain : Persiapan Pemilihan Penyediaan, Pelaksanaan Pemilihan Penyediaan, Penandatanganan Kontrak)
- 00.3.4 Swakelola (antara lain : Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi)
- 00.3.5 Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan (antara lain : Data Base Pengguna Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, Data Base Kontrak, Data Base Pengadaan Barang/Jasa)
- 00.3.6 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan (antara lain : Laporan Hasil Monitoring, Laporan Hasil Evaluasi)

00.4 PERPUSTAKAAN

- 00.4.1 Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 00.4.2 Deposit Bahan Pustaka
 - 00.4.2.1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
 - 00.4.2.2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
 - 00.4.2.3 Terbitan Internasional dan Regional
 - 00.4.2.4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
 - 00.4.2.5 Bibliografi dan Katalog
- 00.4.3 Koleksi Pustaka
 - 00.4.3.1 Pembelian
 - 00.4.3.2 Hibah
 - 00.4.3.3 Hadiah
 - 00.4.3.4 Tukar Menukar
 - 00.4.3.5 Implementasi Undang-Undang KCKR
 - 00.4.3.6 Terbitan Internal
 - 00.4.3.7 Pendistribusian bahan pustaka surplus
 - 00.4.3.8 Inventarisasi Koleksi (Buku Induk)
- 00.4.4 Pengolahan Bahan Pustaka
- 00.4.5 Pangkalan Data Katalog Koleksi
- 00.4.6 Layanan Perpustakaan
 - 00.4.6.1 Keanggotaan
 - 00.4.6.2 Peminjaman
 - 00.4.6.3 Pengembangan Gemar Baca
- 00.4.7 Kerjasama Perpustakaan
 - 00.4.7.1 MoU
 - 00.4.7.2 Perjanjian Kerjasama
 - 00.4.7.3 Partisipasi Organisasi Dan Profesi dan Kerjasama Internasional
- 00.4.8 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
 - 00.4.8.1 Pengembangan Situs Web
 - 00.4.8.2 Pengembangan Kemas Ulang Informasi Multimedia
 - 00.4.8.3 Pengembangan Program Aplikasi Perpustakaan
 - 00.4.8.4 Pengembangan Pangkalan Data Kepustakaan Digital
- 00.4.9 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
- 00.4.10 Konservasi
 - 00.4.10.1 Perawatan Bahan Perpustakaan
 - 00.4.10.2 Perbaikan Bahan Perpustakaan
 - 00.4.10.3 Penjilidan Bahan Perpustakaan

- 00.4.11 Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
- 00.4.12 Transformasi Digital
- 00.4.13 Kurasi Digital
- 00.4.14 Pengembangan Perpustakaan
 - 00.4.14.1 Perpustakaan Umum
 - 00.4.14.2 Perpustakaan Khusus
 - 00.4.14.3 Perpustakaan Sekolah
 - 00.4.14.4 Perpustakaan Perguruan Tinggi

00.5 KEARSIPAN

- 00.5.1 Kebijakan di Bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 00.5.2 Pembinaan Kearsipan
 - 00.5.2.1 Pengembangan Profesi Arsiparis (antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis)
 - 00.5.2.2 Bimbingan Konsultasi Arsiparis
 - 00.5.2.3 Penilaian Arsiparis
 - 00.5.2.4 Pemilihan Arsiparis Teladan (antara lain : Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan)
 - 00.5.2.5 Data Base Arsiparis
 - 00.5.2.6 Bimbingan Konsultasi Kearsipan
 - 00.5.2.7 Supervisi dan Evaluasi (antara lain : Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi)
 - 00.5.2.8 Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
 - 00.5.2.9 Fasilitasi Kearsipan (antara lain : Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan)
 - 00.5.2.10 Lembaga/Unit Kearsipan Teladan (antara lain : Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan)
 - 00.5.2.11 Jadwal Retensi Arsip (antara lain : Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI)
- 00.5.3 Pengelolaan Arsip Dinamis
 - 00.5.3.1 Penciptaan (antara lain : Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)
 - 00.5.3.2 Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain : Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas)

- 00.5.3.3 Penataan Arsip Inaktif (antara lain : Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Dinamis, Bukti Peminjaman Arsip)
- 00.5.3.4 Penggunaan (antara lain : Daftar Arsip Dinamis berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan akses Arsip Dinamis, Bukti Peminjaman Arsip)
- 00.5.3.5 Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain : Pembuktiaan Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis)
- 00.5.4 Program Arsip Vital (antara lain : Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital)
- 00.5.5 Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain : Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga)
- 00.5.6 Penyusutan Arsip
 - 00.5.6.1 Pemindahan Arsip (antara lain : Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)
 - 00.5.6.2 Pemusnahan Arsip (antara lain : SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk Pemusnahan Arsip dengan Retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk Pemusnahan Arsip dengan Retensi dibawah 10 Tahun, Penetapan Arsip yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip yang Dimusnahkan)
 - 00.5.6.3 Penyerahan Arsip Statis (antara lain : Pembentukan Panitia Penilai, Notulen Rapat Panitia, Surat Pertimbangan Panitia penilai, Surat Persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat Pernyataan Autentik, Terpercaya, Utuh, dan digunakan dari Pencipta Arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)
- 00.5.7 Alih Media Arsip (antara lain : Kebijakan Alih Media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang Alih Mediakan)
- 00.5.8 Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis
 - 00.5.8.1 Data Base Pengelolaan Arsip Aktif
 - 00.5.8.2 Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif



- 00.5.9 Pengelolaan Arsip Statis
 - 00.5.9.1 Akusisi (antara lain : Monitoring Fisik dan Daftar, Verifikasi terhadap Daftar Arsip, Menetapkan Status Arsip Statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan Arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang diserahkan)
 - 00.5.9.2 Penghargaan dan Imbalan
 - 00.5.9.3 Sejarah Lisan (antara lain : Administrasi Kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/Media lain sesuai Perkembangan TI, dan Transkrip)
 - 00.5.9.4 Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain : Pengumuman, Akuisisi Daftar Pencarian Arsip Statis)
 - 00.5.9.5 Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain : Daftar Arsip Statis, Inventaris Arsip Statis, Guide)
 - 00.5.9.6 Preservasi Preventif (antara lain : Penyimpanan, Pengendalian Hama Terpadu, Reproduksi (alih media)
 - 00.5.9.7 Preservasi Kuratif
 - 00.5.9.8 Autentikasi Arsip Statis (antara lain : Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentitas Arsip Statis)
 - 00.5.9.9 Akses Arsip Statis (antara lain : Layanan Arsip, Penerbitan Naskah Sumber)
- 00.5.10 Jasa Kearsipan (antara lain : Konsultasi Kearsipan, Manual Kearsipan, Penataan Arsip, Otomasi Kearsipan, Penyimpanan Arsip, Perawatan dan Pemeliharaan Arsip)
- 00.5.11 Pengelolaan SIKN dan JIKN
- 00.5.12 Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana
- 00.5.13 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah digabung dan / atau dibubarkan
- 00.5.14 Penertiban Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
- 00.5.15 Pengawasan Kearsipan
 - 00.5.15.1 Pengawasan Kearsipan Internal
 - 00.5.15.2 Pengawasan Kearsipan Eksternal
 - 00.5.15.3 Sanksi

00.6 PERSANDIAN

- 00.6.1 Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah



- 00.6.2 Pengamanan Persandian
 - 00.6.2.1 Pengamanan Sinyal : Teknik Sandi dan Kripto
 - 00.6.2.2 Analisis Sinyal : Teknik Sandi dan Kripto
 - 00.6.2.3 Materiil Sandi : Sistem dan Peralatan
- 00.6.3 Pengkajian Persandian : Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi
 - 00.6.3.1 Perencanaan Pengkajian
 - 00.6.3.2 Administrasi Pengkajian
 - 00.6.3.3 Pelaksanaan
 - 00.6.3.4 Pelaporan
- 00.6.4 Pembinaan dan Pengendalian Persandian
 - 00.6.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 00.6.4.2 Jaring Komunikasi
- 00.6.5 Layanan Sertifikasi Elektronik
 - 00.6.5.1 Perencanaan dan Administrasi
 - 00.6.5.2 Pelaksanaan Verifikasi
 - 00.6.5.3 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
 - 00.6.5.4 Penyesuaian Sistem dan Testing
 - 00.6.5.5 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
 - 00.6.5.6 Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
 - 00.6.5.7 Pelaporan

00.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

- 00.7.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang
 - 00.7.1.1 Musrenbang Provinsi
 - 00.7.1.2 Musrenbang Nasional
 - 00.7.1.3 Musrenbang Kab/Kota
 - 00.7.1.4 Musrenbang Kecamatan
 - 00.7.1.5 Musrenbang Kelurahan
 - 00.7.1.6 Musrenbang Desa
- 00.7.2 Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 00.7.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
 - 00.7.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
 - 00.7.2.3 Rencana Anggaran Daerah
 - 00.7.2.4 Rencana Pembangunan Tahunan
 - 00.7.2.5 Rencanan Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - 00.7.2.6 Program Kerja Tahunan
 - 00.7.2.7 Penetapan/Kontrak Kinerja
 - 00.7.2.8 Laporan Berkala
 - 00.7.2.9 Laporan Insidental
 - 00.7.2.10 Evaluasi Program
- 00.7.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
- 00.7.4 Konsultasi Perencanaan Pembangunan



- 00.7.5 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan
Perencanaan Pembangunan
- 00.7.6 Aksi Strategis Daerah
 - 00.7.6.1 Rancangan Awal Perencanaan Aksi Strategi
Daerah
 - 00.7.6.2 Rapat Pembahasan Rancangan Awal
dengan Perangkat Daerah
 - 00.7.6.3 Sosialisasi dengan Perangkat Daerah
 - 00.7.6.4 Rancangan Akhir Perencanaan Aksi
Strategi Daerah
 - 00.7.6.5 Penerapan Perencanaan Aksi Strategi
Daerah
- 00.7.7 Perencanaan Pendanaan Pembangunan
 - 00.7.7.1 Pendanaan Nasional dan Hibah
 - 00.7.7.2 Pendanaan Daerah
 - 00.7.7.3 Kerjasama Pembangunan Nasional
 - 00.7.7.4 Surat Berharga Syariah Negara
 - 00.7.7.5 Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru

00.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

- 00.8.1 Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintahan
Daerah Kab/kota
 - 00.8.1.1 Pembentukan
 - 00.8.1.2 Pengubahan
 - 00.8.1.3 Pembubaran
- 00.8.2 Uraian Jabatan
 - 00.8.2.1 Analisa Jabatan
 - 00.8.2.2 Analisa Beban Kerja
- 00.8.3 Ketatalaksanaan
 - 00.8.3.1 Proses Bisnis
 - 00.8.3.2 Standar Pelayanan
 - 00.8.3.3 Standar Operasional Prosedur
 - 00.8.3.4 Pelayanan Publik
- 00.8.4 Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan
Fungsional
- 00.8.5 Evaluasi Kelembagaan
- 00.8.6 Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi
 - 00.8.6.1 Budaya Kerja
 - 00.8.6.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
 - 00.8.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

00.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN

- 00.9.1 Kebijakan di Bidang Penelitian, Pengkajian,
Pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah



- 00.9.2 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan (meliputi : Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian/Pengkajian/Rekomendasi)
- 00.9.3 Sosialisasi dan Desiminasi Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan
- 00.9.4 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan
- 00.9.5 Forum Komunikasi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 00.9.6 Data dan Informasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - 00.9.6.1 Data
 - 00.9.6.2 Statistik
 - 00.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian
- 00.9.7 Master Proceeding/Jurnal Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 00.9.8 Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
- 00.9.9 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
- 00.9.10 Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop



100. PEMERINTAHAN

100.1 OTONOMI DAERAH

- 100.1.1 Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 100.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)
- 100.1.3 Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
- 100.1.4 Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
 - 100.1.4.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
 - 100.1.4.2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
 - 100.1.4.3 Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapsitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan
 - 100.1.4.4 Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintahan Daerah dan DPRD)
 - 100.1.4.5 Assosiasi Daerah
- 100.1.5 Otonomi Khusus dan Daerah Istimewa
- 100.1.6 Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
 - 100.1.6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - 100.1.6.2 Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
 - 100.1.6.3 Pengembangan Kapasitas Daerah
- 100.1.7 LKPJ/LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)

100.2 PEMERINTAHAN UMUM

- 100.2.1 Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 100.2.2 Dekonsentrasi dan Kerjasama
 - 100.2.2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
 - 100.2.2.2 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
 - 100.2.2.3 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah



- 100.2.2.4 Fasilitas Kecamatan
- 100.2.2.5 Fasilitas Pelayanan Umum
- 100.2.3 Wilayah Administrasi dan Perbatasan
 - 100.2.3.1 Toponimi dan Data Wilayah
 - 100.2.3.2 Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara
 - 100.2.3.3 Batas Antar Daerah Wilayah
 - 100.2.3.4 Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
 - 100.2.3.5 Pemeliharaan Batas Wilayah

100.3 HUKUM

- 100.3.1 Program Legislasi
 - 100.3.1.1 Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
 - 100.3.1.2 Program Legislasi
- 100.3.2 Rancangan Peraturan Perundangan-Undangan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk Naskah Akademik, Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukum sampai diundangkan
- 100.3.3 Keputusan / Ketetapan Pimpinan Pemerintah
 - 100.3.3.1 Keputusan / Ketetapan Gubernur
 - 100.3.3.2 Keputusan / Ketetapan Bupati
 - 100.3.3.3 Keputusan / Ketetapan Walikota
 - 100.3.3.4 Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
 - 100.3.3.5 Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
 - 100.3.3.6 Keputusan Sekretaris Daerah Kota
- 100.3.4 Instruksi / Surat Edaran
 - 100.3.4.1 Instruksi / Surat Edaran Provinsi
 - 100.3.4.2 Instruksi / Surat Edaran Kabupaten
 - 100.3.4.3 Instruksi / Surat Edaran Kota
 - 100.3.4.4 Instruksi / Surat Edaran Setingkat Eselon II
- 100.3.5 Surat Perintah
 - 100.3.5.1 Surat Perintah Gubernur
 - 100.3.5.2 Surat Perintah Bupati
 - 100.3.5.3 Surat Perintah Walikota
 - 100.3.5.4 Surat Perintah Setingkat Eselon II
- 100.3.6 Standar/ Pedoman/ Prosedur Kerja/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis
- 100.3.7 Nota Kesepakatan/ Memorandum of Understanding (MOU)/ Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama
 - 100.3.7.1 Dalam Negeri
 - 100.3.7.2 Luar Negeri



- 100.3.8 Dokumentasi Hukum (antara lain : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan Referensi)
- 100.3.9 Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pembinaan Hukum
- 100.3.10 Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi Pemberian Bantuan/ Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)
- 100.3.11 Kasus/ Sengketa Hukum
 - 100.3.11.1 Pidana Kasus/ Sengketa Pidana, Baik Kejahatan maupun Pelanggaran
 - 100.3.11.2 Perdata Kasus/ Sengketa Perdata
 - 100.3.11.3 Tata Usaha Negara
 - 100.3.11.4 Perburuhan
 - 100.3.11.5 Arbitrase
 - 100.3.11.6 Sengketa Adat
- 100.3.12 Perijinan
- 100.3.13 Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - 100.3.13.1 Hak Cipta
 - 100.3.13.2 Hak Paten
 - 100.3.13.3 Hak Desain Industri
 - 100.3.13.4 Hak Rahasia Dagang
 - 100.3.13.5 Hak Merk
- 100.3.14 Permohonan HAKI yang ditolak



200. POLITIK

200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- 200.1.1 Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 200.1.2 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - 200.1.2.1 Ketahanan Ideologi Negara
 - 200.1.2.2 Wawasan Kebangsaan
 - 200.1.2.3 Bela Negara
 - 200.1.2.4 Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
 - 200.1.2.5 Pembauran dan Kewarganegaraan
- 200.1.3 Kewaspadaan Nasional
 - 200.1.3.1 Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
 - 200.1.3.2 Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
 - 200.1.3.3 Fasilitasi dan Evaluasi Penangan Konflik Pemerintahan
 - 200.1.3.4 Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
 - 200.1.3.5 Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
- 200.1.4 Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan
 - 200.1.4.1 Ketahanan Seni
 - 200.1.4.2 Ketahanan Budaya
 - 200.1.4.3 Agama dan Kepercayaan
 - 200.1.4.4 Organisasi Kemasyarakatan
 - 200.1.4.5 Masalah Sosial Kemasyarakatan
 - 200.1.4.6 Fasilitasi
 - 200.1.4.7 Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
 - 200.1.4.8 Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
 - 200.1.4.9 Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi
 - 200.1.4.10 Fasilitasi Sengketa Ormas
 - 200.1.4.11 Fasilitasi Ormas
- 200.1.5 Politik Dalam Negeri
 - 200.1.5.1 Implementasi Kebijakan Politik
 - 200.1.5.2 Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
 - 200.1.5.3 Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
 - 200.1.5.4 Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi
 - 200.1.5.5 Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
 - 200.1.5.6 Pemerintah Daerah
 - 200.1.5.7 Database Parpol

- 200.1.5.8 Pendidikan Budaya Politik
- 200.1.5.9 Pemilihan Umum
- 200.1.6 Ketahanan Ekonomi
 - 200.1.6.1 Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
 - 200.1.6.2 Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
 - 200.1.6.3 Perilaku Perekonomian Masyarakat
 - 200.1.6.4 Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi

200.2 PEMILU

- 200.2.1 Kebijakan di Bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 200.2.2 Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
 - 200.2.2.1 Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
 - 200.2.2.2 Daftar Pemilih Sementara (DPS)
 - 200.2.2.3 Daftar Pemilih Tambahan
 - 200.2.2.4 Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 - 200.2.2.5 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- 200.2.3 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
 - 200.2.3.1 Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu dari Partai Politik
 - 200.2.3.2 Dokumen Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Partai Politik
 - 200.2.3.3 Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
 - 200.2.3.4 Dokumen Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual
- 200.2.4 Penetapan Peserta Pemilu
 - 200.2.4.1 Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
 - 200.2.4.2 Keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPR
 - 200.2.4.3 Keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPR
 - 200.2.4.4 Keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
 - 200.2.4.5 Peta Daerah Pemilihan
- 200.2.5 Pencalonan Pemilu
 - 200.2.5.1 Petunjuk Teknis Pencalonan
 - 200.2.5.2 Surat Pencalonan Pendaftaran
 - 200.2.5.3 Daftar Bakal Calon
 - 200.2.5.4 Dokumen Persyaratan Masing-masing Bakal Calon

- 200.2.5.5 Dokumen Verifikasi Administrasi
- 200.2.5.6 Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
- 200.2.6 Kampanye Pemilu
 - 200.2.6.1 Keputusan KPU tentang Penetapan Jadwal Kampanye
 - 200.2.6.2 Nama Juru Kampanye / Pelaksana Kampanye
 - 200.2.6.3 Peringatan Tertulis /Penghentian Kegiatan Kampanye
- 200.2.7 Dana Kampanye
 - 200.2.7.1 Pendoman Audit Dana Kampanye
 - 200.2.7.2 Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu
 - 200.2.7.3 Laporan Hasil Audit Dana Kampanye
- 200.2.8 Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - 200.2.8.1 Keputusan KPU tentang Desaian dan Spesifikasi Surat Suara
 - 200.2.8.2 Master Surat Suara
 - 200.2.8.3 Surat Suara yang Terpakai
 - 200.2.8.4 Surat Suara Tidak Terpakai (Rusak, Salah, dan Tidak Digunakan)
 - 200.2.8.5 Formulir Pemilu di Pemerintah Daerah
- 200.2.9 Penetapan Hasil Pemilu
- 200.2.10 Perselisihan Hasil Pemilu
 - 200.2.10.1 Surat-surat Mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
 - 200.2.10.2 Jawaban dan Kesimpulan Termohon
 - 200.2.10.3 Salinan Putusan Lembaga Peradilan
- 200.2.11 Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilu

300. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- 300.1.1 Kebijakan di Bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah
- 300.1.2 Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja
 - 300.1.2.1 Tata Operasional Polisi Pamong Praja
 - 300.1.2.2 Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
- 300.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
- 300.1.4 Perlindungan Masyarakat
- 300.1.5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- 300.1.6 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia

300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN

- 300.2.1 Kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 300.2.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan
 - 300.2.2.1 Rencana dan Standardisasi dan Pengawasan dan Perbekalan
 - 300.2.2.2 Kurikulum dan Silabus, Evaluasi dan, Monitoring
 - 300.2.2.3 Tenaga Pencarian Pertolongan, Penyiapan Potensi Pencarian dan Pertolongan
 - 300.2.2.4 Per masyarakatan Pencarian dan Pertolongan, Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
 - 300.2.2.5 Perencanaan dan Standarisasi, Penyelenggaraan Operasi SAR, Siaga dan Latihan, Tempat Latihan
 - 300.2.2.6 Registrasi BEACON
- 300.2.3 Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- 300.2.4 Potensi Pencarian dan Pertolongan
- 300.2.5 Bina Ketenagaan dan Per masyarakatan
 - 300.2.5.1 Rencana Pendidikan dan Pelatihan
 - 300.2.5.2 Penyiapan Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan
 - 300.2.5.3 Per masyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
 - 300.2.5.4 Per masyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
 - 300.2.5.5 Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan

- 300.2.6 Operasi Pencarian dan Pertolongan
- 300.2.7 Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi
- 300.2.8 Operasi Komunikasi
 - 300.2.8.1 Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
 - 300.2.8.2 Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
 - 300.2.8.3 Registrasi BEACON
- 300.2.9 Inventarisasi dan Pemeliharaan
- 300.2.10 Pengembangan Sistem Informasi
- 300.2.11 Penyajian dan Layanan Informasi
- 300.2.12 Pelaporan dan Evaluasi
 - 300.2.12.1 Laporan Harian
 - 300.2.12.2 Laporan Bulanan
 - 300.2.12.3 Laporan Tahunan
 - 300.2.12.4 Evaluasi



400. KESEJAHTERAAN RAKYAT

400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

- 400.1.1 Kebijakan di Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.1.2 Pembangunan Sumber Daya
 - 400.1.2.1 Fasilitasi Pendidikan Keterampilan Pengembangan Sumber Daya
 - 400.1.2.2 Fasilitasi Sumber Daya Hayati dan Pengembangan Sumber Daya
 - 400.1.2.3 Fasilitasi Sumber Daya Hayati dan Pengembangan Sumber Daya
 - 400.1.2.4 Fasilitasi Mineral, Energi dan Lingkungan Hidup
 - 400.1.2.5 Fasilitasi Teknologi dan Inovasi
 - 400.1.2.6 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya
 - 400.1.2.7 Pemantauan dan Evaluasi
- 400.1.3 Peningkatan Infrastruktur
 - 400.1.3.1 Fasilitasi Transportasi Peningkatan Infrastruktur
 - 400.1.3.2 Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam Peningkatan Infrastruktur
 - 400.1.3.3 Fasilitasi Sosial dalam Peningkatan Infrastruktur
 - 400.1.3.4 Fasilitasi Ekonomi dalam Peningkatan Infrastruktur
 - 400.1.3.5 Fasilitasi Energi dalam Peningkatan Infrastruktur
 - 400.1.3.6 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Infrastruktur
 - 400.1.3.7 Pemantuan dan Evaluasi
- 400.1.4 Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
 - 400.1.4.1 Fasilitasi Invenstasi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
 - 400.1.4.2 Fasilitasi Kelembagaan Ekonomi dan Dunia Usaha
 - 400.1.4.3 Fasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - 400.1.4.4 Fasilitasi Kemitraan Usaha
 - 400.1.4.5 Fasilitasi Pengembangan Komoditas Unggulan
 - 400.1.4.6 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
 - 400.1.4.7 Pemantuan dan Evaluasi
 - 400.1.4.8 Identifikasi dan Inventarisasi Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan Tertinggal
 - 400.1.4.9 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan Tertinggal
 - 400.1.4.10 Monitoring dan Evaluasi Ekonomi Desa Tertinggal

- 400.1.4.11 Identifikasi dan Inventarisasi Pengembangan Masyarakat dan Desa Tertinggal
- 400.1.4.12 Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa Tertinggal
- 400.1.4.13 Monitoring dan Evaluasi Masyarakat Tertinggal
- 400.1.4.14 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
- 400.1.5 Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
 - 400.1.5.1 Penguatan Kapasitas Lembaga Lokal
 - 400.1.5.2 Penguatan Organisasi Masyarakat
 - 400.1.5.3 Pemberdayaan Masyarakat
 - 400.1.5.4 Kerjasama antar Lembaga Sosial dan Budaya
 - 400.1.5.5 Ketenagakerjaan
 - 400.1.5.6 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
 - 400.1.5.7 Pemantuan dan Evaluasi
- 400.1.6 Pengembangan Daerah Khusus
 - 400.1.6.1 Fasilitasi Pengembangan Daerah Perbatasan
 - 400.1.6.2 Fasilitasi Pengembangan Daerah Rawan Konflik dan Bencana
 - 400.1.6.3 Fasilitasi Pengembangan Daerah Perdesaan
 - 400.1.6.4 Fasilitasi Pengembangan Daerah Pulau Terpencil dan Terluar
 - 400.1.6.5 Fasilitasi Pengembangan Wilayah Strategis
 - 400.1.6.6 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Daerah Khusus
 - 400.1.6.7 Pemantauan dan Evaluasi

400.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 400.2.1 Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah
- 400.2.2 Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum
 - 400.2.2.1 Data Gender
 - 400.2.2.2 Advokasi dan Fasilitasi
- 400.2.3 Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)
 - 400.2.3.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
 - 400.2.3.2 Data Perlindungan Perempuan
 - 400.2.3.3 Advokasi dan Fasilitasi
 - 400.2.3.4 Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Perempuan
 - 400.2.3.5 Sistem Aplikasi dan Jaringan Informasi Gender

- 400.2.3.6 Analisis dan Penyajian Informasi Gender
- 400.2.3.7 Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Ibu
- 400.2.4 Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan dengan Hukum)
 - 400.2.4.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
 - 400.2.4.2 Data Perlindungan Anak
 - 400.2.4.3 Advokasi dan Fasilitasi
 - 400.2.4.4 Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Anak
 - 400.2.4.5 Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Anak
- 400.2.5 Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)
 - 400.2.5.1 Pemenuhan Hak Anak
 - 400.2.5.2 Data Klaster Hak Anak
 - 400.2.5.3 Data Tumbuh Kembang Anak
 - 400.2.5.4 Advokasi dan Fasilitasi
 - 400.2.5.5 Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Tumbuh Kembang Anak
 - 400.2.5.6 Penyelenggaraan Parenting Pola Pengasuh Anak
- 400.2.6 Penghargaan Terkait Gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)
- 400.2.7 Penghargaan Kabupaten Layak Anak
- 400.2.8 Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak

400.3 PENDIDIKAN

- 400.3.1 Kebijakan di Bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.3.2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal
 - 400.3.2.1 Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
 - 400.3.2.2 Pelatihan Sosial
 - 400.3.2.3 Peringatan Hari Anak
 - 400.3.2.4 Block Grant
- 400.3.3 Pendidikan Masyarakat
 - 400.3.3.1 Penyelenggaraan Program
 - 400.3.3.2 Penilaian dan Pemberian Bantuan Sosial
 - 400.3.3.3 Pembinaan Program
 - 400.3.3.4 Lomba/Pemberian Penghargaan
 - 400.3.3.5 Pameran
 - 400.3.3.6 Rakor
 - 400.3.3.7 Sosialisasi
 - 400.3.3.8 Sertifikasi dan Akreditasi



- 400.3.4 Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik
- 400.3.5 Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama
 - 400.3.5.1 Kurikulum, Bahan Ajar
 - 400.3.5.2 Block Grant
 - 400.3.5.3 Pelatihan, Bimtek, Sosialisasi
 - 400.3.5.4 Lomba, Penghargaan, Penganugerahan
 - 400.3.5.5 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
 - 400.3.5.6 Bantuan Siswa Miskin
- 400.3.6 Pendidikan Khusus/Layanan Khusus
 - 400.3.6.1 Kurikulum, Bahan Ajar, Alat Bantu Pembelajaran
 - 400.3.6.2 Block Grant
 - 400.3.6.3 Lomba, Festival
 - 400.3.6.4 Sosialisasi, Bimtek
 - 400.3.6.5 Pendataan
 - 400.3.6.6 Kelembagaan
- 400.3.7 Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Pendidik
 - 400.3.7.1 Pendataan dan Pemetaan
 - 400.3.7.2 Uji Kompetensi Guru
 - 400.3.7.3 Sertifikasi Guru
 - 400.3.7.4 Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan
 - 400.3.7.5 Peningkatan Kesejahteraan Guru
 - 400.3.7.6 Sosialisasi, Bimtek
 - 400.3.7.7 Block Grant
- 400.3.8 Sekolah Menengah Atas
 - 400.3.8.1 Kurikulum
 - 400.3.8.2 Bahan Ajar
 - 400.3.8.3 Pelatihan
 - 400.3.8.4 Block Grant
 - 400.3.8.5 Bimbingan Teknis/Sosialisasi
 - 400.3.8.6 Lomba, Sayembara, Festival
 - 400.3.8.7 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
 - 400.3.8.8 Bantuan Siswa Miskin
- 400.3.9 Pendidikan Khusus - Layanan Khusus
 - 400.3.9.1 Bahan Ajar
 - 400.3.9.2 Petunjuk Teknis
 - 400.3.9.3 Black Grant
 - 400.3.9.4 Sosialisasi, Bimtek
 - 400.3.9.5 Lomba, Sayembara, Festival
 - 400.3.9.6 Kurikulum/Bahan Pembelajaran
 - 400.3.9.7 Alat Bantu Pembelajaran
 - 400.3.9.8 Pendataan
 - 400.3.9.9 Kelembagaan (Unit Kesehatan Sekolah, Pendidikan Jasmani Adaptif, Pendidikan Inklusi)
- 400.3.10 Pendidik dan Tenaga Pendidik
 - 400.3.10.1 Pendataan dan Pemetaan
 - 400.3.10.2 Uji Kompetensi Guru
 - 400.3.10.3 Sertifikasi Guru

- 400.3.10.4 Penilaian Prestasi Kerja Guru dan Pengawas Sekolah
- 400.3.10.5 Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan
- 400.3.10.6 Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Pendidik
- 400.3.10.7 Block Grant
- 400.3.10.8 Bimbingan Teknis/Sosialisasi
- 400.3.11 Penilaian Pendidikan
 - 400.3.11.1 Penilaian Akademik
 - 400.3.11.2 Penilaian Non Akademik
 - 400.3.11.3 Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
- 400.3.12 Data dan Statistik Pendidikan
 - 400.3.12.1 Data Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 400.3.12.2 Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
- 400.3.13 Prasarana dan Sarana Pendidikan
 - 400.3.13.1 Prasarana Pendidikan
 - 400.3.13.2 Sarana Pendidikan
 - 400.3.13.3 Monitoring dan Evaluasi

400.4 KEOLAHRAGAAN

- 400.4.1 Kebijakan di Bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.4.2 Pengelolaan Olahraga Pendidikan
 - 400.4.2.1 Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 400.4.2.2 Olahraga Pendidikan Tinggi
 - 400.4.2.3 Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.4.3 Pengelolaan Olahraga Rekreasi
 - 400.4.3.1 Olahraga Massal
 - 400.4.3.2 Olahraga Tradisional
 - 400.4.3.3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata
- 400.4.4 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga
 - 400.4.4.1 Olahraga Pendidik
 - 400.4.4.2 Olahraga Rekreasi
 - 400.4.4.3 Olahraga Prestasi
 - 400.4.4.4 Sekolah Khusus Olahraga
- 400.4.5 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
 - 400.4.5.1 Olahraga Tradisional
 - 400.4.5.2 Layanan Khusus

- 400.4.6 Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
 - 400.4.6.1 Kemitraan Keolahragaan
 - 400.4.6.2 Penghargaan Olahraga
- 400.4.7 Pembibitan dan IPTEK Olahraga
 - 400.4.7.1 Pembibitan Olahraga
 - 400.4.7.2 Kompetisi
 - 400.4.7.3 IPTEK Olahraga
- 400.4.8 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
 - 400.4.8.1 Tenaga Keolahragaan
 - 400.4.8.2 Organisasi Keolahragaan
- 400.4.9 Industri dan Promosi Olahraga
 - 400.4.9.1 Industri Olahraga
 - 400.4.9.2 Promosi Olahraga
- 400.4.10 Olahraga Prestasi
 - 400.4.10.1 Daerah
 - 400.4.10.2 Nasional
 - 400.4.10.3 Internasional
- 400.4.11 Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga
 - 400.4.11.1 Standardisasi Keolahragaan
 - 400.4.11.2 Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
 - 400.4.11.3 Infrastruktur Olahraga

400.5 KEPEMUDAAN

- 400.5.1 Kebijakan di Bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.5.2 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
 - 400.5.2.1 Penelusuran (Duta Kepemudaan)
 - 400.5.2.2 Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan Melalui Forum Kepemudaan)
 - 400.5.2.3 Pengembangan
- 400.5.3 Peningkatan Wawasan Pemuda
 - 400.5.3.1 Wawasan Kebangsaan
 - 400.5.3.2 Wawasan Lingkungan
 - 400.5.3.3 Wawasan Sosial dan Hukum
- 400.5.4 Peningkatan Kapasitas Pemuda
 - 400.5.4.1 Kapasitas Iman dan Taqwa
 - 400.5.4.2 Kapasitas IPTEK
 - 400.5.4.3 Pemanfaatan IPTEK
- 400.5.5 Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas / Seni Kepemudaan)
 - 400.5.5.1 Pengkajian
 - 400.5.5.2 Pengembangan
 - 400.5.5.3 Pendayagunaan (Fasilitas)
- 400.5.6 Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda



- 400.5.6.1 Kepemimpinan : Penelelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
- 400.5.6.2 Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawan, Pengembangan Kepedulian, Pendampingan
- 400.5.7 Kewirausahaan
 - 400.5.7.1 Kelembagaan
 - 400.5.7.2 Pangaderan
 - 400.5.7.3 Perintisan
- 400.5.8 Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan
 - 400.5.8.1 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya
 - 400.5.8.2 Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya
 - 400.5.8.3 Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran : Kelembagaan dan Sumberdaya
 - 400.5.8.4 Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya
- 400.5.9 Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda
 - 400.5.9.1 Standardisasi
 - 400.5.9.2 Infrastruktur
- 400.5.10 Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
 - 400.5.10.1 Kemitraan
 - 400.5.10.2 Penghargaan Pemuda

400.6 KEBUDAYAAN

- 400.6.1 Kebijakan di Bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.6.2 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
 - 400.6.2.1 Registrasi Nasional
 - 400.6.2.2 Perlindungan
 - 400.6.2.3 Pengembangan dan Pemanfaatan
 - 400.6.2.4 Eksplorasi dan Dokumentasi
- 400.6.3 Pembinaan Kesenian dan Perfilman
 - 400.6.3.1 Pembinaan Seni Pertunjukan
 - 400.6.3.2 Pembinaan Seni Rupa
 - 400.6.3.3 Pembinaan Seni Literasi dan Apresiasi Film
 - 400.6.3.4 Dokumentasi dan Publikasi
- 400.6.4 Sejarah dan Nilai Budaya
 - 400.6.4.1 Sejarah
 - 400.6.4.2 Pemetaan Nilai
 - 400.6.4.3 Verifikasi dan Perumusan Nilai
 - 400.6.4.4 Dokumentasi dan Publikasi
 - 400.6.4.5 Dokumentasi Sejarah dan Nilai Sejarah
 - 400.6.4.6 Publikasi Sejarah dan Nilai Sejarah



- 400.6.5 Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
 - 400.6.5.1 Internalisasi Nilai Budaya
 - 400.6.5.2 Kekayaan Budaya
 - 400.6.5.3 Warisan Budaya Nasional dan Dunia
 - 400.6.5.4 Diplomasi Budaya

400.7 KESEHATAN

- 400.7.1 Kebijakan di Bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.7.2 Upaya Kesehatan Dasar
 - 400.7.2.1 Pelayanan Kedokteran Keluarga
 - 400.7.2.2 Praktek Klinik Dokter di Pelayanan Kesehatan Primer
 - 400.7.2.3 Pelaksanaan Kesehatan Primer
 - 400.7.2.4 Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas
 - 400.7.2.5 Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit
 - 400.7.2.6 ICD 10, Destistry & Stomatology
 - 400.7.2.7 Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah
 - 400.7.2.8 Penyakit Mulut di Tingkat Primer
 - 400.7.2.9 Pembiayaan Darah
 - 400.7.2.10 Penggunaan Darah Rasional
 - 400.7.2.11 Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Darah
 - 400.7.2.12 Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpenci, Sangat Terpencil dan Kepulauan
 - 400.7.2.13 Akreditasi Puskesmas
 - 400.7.2.14 Puskesmas Berprestasi
- 400.7.3 Upaya Kesehatan Rujukan
 - 400.7.3.1 Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - 400.7.3.2 Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)
 - 400.7.3.3 Pelayanan Rumah Sakit Privat
 - 400.7.3.4 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
 - 400.7.3.5 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan
 - 400.7.3.6 Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan
 - 400.7.3.7 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Asing dan Perdagangan
 - 400.7.3.8 Badan Pengawas Rumah Sakit
 - 400.7.3.9 Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A dan Penanaman Modal Asing (PMA)
 - 400.7.3.10 Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 400.7.4 Keperawatan dan Keteknisian Medik
 - 400.7.4.1 Pelayanan Keperawatan Dasar
 - 400.7.4.2 Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit



- 400.7.4.3 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
- 400.7.4.4 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
- 400.7.4.5 Bina Pelayanan Kebidanan
- 400.7.5 Penunjuk Medik dan Sarana Kesehatan
 - 400.7.5.1 Mikrobiologi dan Imunologi
 - 400.7.5.2 Patologi dan Toksikologi
 - 400.7.5.3 Radiologi
 - 400.7.5.4 Perizinan dan Sertifikasi
 - 400.7.5.5 Sarana dan Prasarana Kesehatan
 - 400.7.5.6 Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 400.7.5.7 Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan
- 400.7.6 Kesehatan Jiwa
 - 400.7.6.1 Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 400.7.6.2 Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 400.7.6.3 Etikolegal dan Asesmen
 - 400.7.6.4 Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika dan Sejenisnya
 - 400.7.6.5 Etikolegal dan Asesmen
 - 400.7.6.6 Kesehatan Jiwa Kelompok Beresiko
- 400.7.7 Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
 - 400.7.7.1 Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa
 - 400.7.7.2 Imunisasi
 - 400.7.7.3 Karantina Kesehatan dan Kesehatan di Pelabuhan
 - 400.7.7.4 Kesehatan Matra
- 400.7.8 Pengendalian Penyakit Menular Langsung
 - 400.7.8.1 Pengendalian Tuberkulosis
 - 400.7.8.2 Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual
 - 400.7.8.3 Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut
 - 400.7.8.4 Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan
 - 400.7.8.5 Pengendalian Kusta dan Frambusia
- 400.7.9 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
 - 400.7.9.1 Pengendalian Malaria
 - 400.7.9.2 Pengendalian Arbovirosis
 - 400.7.9.3 Pengendalian Zoonosis
 - 400.7.9.4 Pengendalian Filariasis dan Kecacingan
- 400.7.10 Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - 400.7.10.1 Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
 - 400.7.10.2 Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik



- 400.7.10.3 Penyakit Kanker
- 400.7.10.4 Penyakit Kronis dan Generatif
- 400.7.10.5 Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan
- 400.7.11 Penyehatan Lingkungan
 - 400.7.11.1 Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar
 - 400.7.11.2 Pemukiman dan Tempat Umum
 - 400.7.11.3 Kawasan dan Sanitasi Darurat
 - 400.7.11.4 Higien Sanitasi Pangan
 - 400.7.11.5 Pengamanan Limbah, Udara, Radiasi
- 400.7.12 Pengembangan dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Pengendalian Lingkungan
- 400.7.13 Gizi
 - 400.7.13.1 Gizi Makro
 - 400.7.13.2 Gizi Mikro
 - 400.7.13.3 Gizi Klinik dan Diatek
 - 400.7.13.4 Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan
 - 400.7.13.5 Kewaspadaan Gizi
- 400.7.14 Kesehatan Ibu
 - 400.7.14.1 Kesehatan Ibu Hamil
 - 400.7.14.2 Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas
 - 400.7.14.3 Kesehatan Maternal dengan Pencegahan Komplikasi
 - 400.7.14.4 Keluarga Berencana
 - 400.7.14.5 Perlindungan Kesehatan Reproduksi
- 400.7.15 Kesehatan Anak
 - 400.7.15.1 Kelangsungan Hidup Bayi
 - 400.7.15.2 Kelangsungan Anak Balita dan Pra Sekolah
 - 400.7.15.3 Kewaspadaan Penanganan Balita Beresiko
 - 400.7.15.4 Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja
 - 400.7.15.5 Perlindungan Kesehatan Anak
- 400.7.16 Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer
 - 400.7.16.1 Kesehatan Tradisional Keterampilan
 - 400.7.16.2 Kesehatan Tradisional Ramuan
 - 400.7.16.3 Kesehatan Alternatif dan Komplementer
 - 400.7.16.4 Penapisan dan Kemitraan
- 400.7.17 Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - 400.7.17.1 Pelayanan Kesehatan Kerja
 - 400.7.17.2 Kapasitas Kerja
 - 400.7.17.3 Lingkungan Kerja
 - 400.7.17.4 Kemitraan Kesehatan Kerja
 - 400.7.17.5 Kesehatan Perkotaan
 - 400.7.17.6 Kesehatan Olahraga
- 400.7.18 Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
 - 400.7.18.1 Harga Obat Publik



- 400.7.18.2 Pengadaan Obat
- 400.7.18.3 Perbekalan Kesehatan
- 400.7.19 Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
 - 400.7.19.1 Alat Kesehatan
 - 400.7.19.2 Produsen dan Distribusi Alat Kesehatan dan Obat
 - 400.7.19.3 Produk Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
- 400.7.20 Kefarmasian
 - 400.7.20.1 Pelayanan Kefarmasian
 - 400.7.20.2 Farmasi Klinis
 - 400.7.20.3 Farmasi Komunitas
 - 400.7.20.4 Penggunaan Obat Rasional
- 400.7.21 Produksi dan Distribusi Kefarmasian
 - 400.7.21.1 Obat Tradisional
 - 400.7.21.2 Kosmetik dan Makanan
 - 400.7.21.3 Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi dan Sediaan Farmasi Khusus
 - 400.7.21.4 Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat
- 400.7.22 Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan
 - 400.7.22.1 Surat Keterangan
 - 400.7.22.2 Sertifikasi dan Perijinan
- 400.7.23 Penanggulangan Krisis Kesehatan
 - 400.7.23.1 Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan
 - 400.7.23.2 Tanggap Darurat dan Pemulihan
 - 400.7.23.3 Pemantauan dan Informasi
 - 400.7.23.4 Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
 - 400.7.23.5 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana
- 400.7.24 Pengembangan dan Jaminan Kesehatan
 - 400.7.24.1 Tersedianya Data NHA Setiap Tahun
 - 400.7.24.2 Tersedianya Dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN
- 400.7.25 Inteligensia Kesehatan
 - 400.7.25.1 Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan
 - 400.7.25.2 Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan
- 400.7.26 Kesehatan Haji
 - 400.7.26.1 Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji
 - 400.7.26.2 Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji
- 400.7.27 Promosi Kesehatan
 - 400.7.27.1 Sarana Promosi Kesehatan



- 400.7.27.2 Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran
- 400.7.27.3 Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan
- 400.7.27.4 Hari Kesehatan
- 400.7.28 Data dan Informasi
 - 400.7.28.1 Statistik Kesehatan
 - 400.7.28.2 Analisis dan Diseminasi Informasi
 - 400.7.28.3 Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan
- 400.7.29 Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen
 - 400.7.29.1 Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik
 - 400.7.29.2 Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen
 - 400.7.29.3 Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen
 - 400.7.29.4 Obat Asli Indonesia
- 400.7.30 Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
 - 400.7.30.1 Penilaian Keamanan Pangan
 - 400.7.30.2 Standardisasi Produk Pangan
 - 400.7.30.3 Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan
 - 400.7.30.4 Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan
 - 400.7.30.5 Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
- 400.7.31 Rekam Medis

400.8 AGAMA DAN KEPERCAYAAN

- 400.8.1 Kebijakan di Bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah
- 400.8.2 Fasilitas
 - 400.8.2.1 Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota
 - 400.8.2.2 Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
 - 400.8.2.3 Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan
 - 400.8.2.4 Kasus Keagamaan
 - 400.8.2.5 Kasus Aliran Keagamaan
- 400.8.3 Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME
 - 400.8.3.1 Kelembagaan dan Kepercayaan
 - 400.8.3.2 Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
 - 400.8.3.3 Komunitas Kepercayaan
 - 400.8.3.4 Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional
 - 400.8.3.5 Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial



400.9 SOSIAL

- 400.9.1 Kebijakan di Bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.9.2 Kesejahteraan Sosial Anak
 - 400.9.2.1 Kesejahteraan Sosial Anak Balita
 - 400.9.2.2 Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar
 - 400.9.2.3 Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum
 - 400.9.2.4 Kesejahteraan Sosial Anak Dengan Catatan
 - 400.9.2.5 Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus
- 400.9.3 Rehabilitas Sosial
 - 400.9.3.1 Rehabilitas Sosial Orang dengan Kecacatan Tubuh Bekas Penderita Penyakit Kronis, Netra dan Rungu Wicara, Mental
 - 400.9.3.2 Kelembagaan dan Advokasi Sosial
 - 400.9.3.3 Asistensi dan Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial
- 400.9.4 Rehabilitas Sosial Tuna Sosial
 - 400.9.4.1 Gelandangan, Pengemis dan Pemulung
 - 400.9.4.2 Tuna Susila dan Korban Traffking Perempuan
 - 400.9.4.3 Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Meliputi Penyiapan, Reintegrasi
 - 400.9.4.4 Pelayanan Sosial Orang dengan HIV/AIDS dan Kelompok Minoritas
- 400.9.5 Rehabilitas Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
- 400.9.6 Pelayanan Sosial Lanju Usia
 - 400.9.6.1 Pelayanan Sosial Dalam dan Luar Panti
 - 400.9.6.2 Pengembangan Kelembagaan meliputi : Pembinaan Lembaga, Kerjasama Lembaga
 - 400.9.6.3 Advokasi dan Pelayanan Sosial Kedaruratan
- 400.9.7 Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
- 400.9.8 Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
- 400.9.9 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - 400.9.9.1 Ketahanan Sosial Masyarakat meliputi : Keresasian Sosial, Penguatan Sumber Daya
 - 400.9.9.2 Tanggap Darurat meliputi : Bantuan Darurat, Advokasi Sosial
 - 400.9.9.3 Pemulihan Sosial meliputi : Penguatan Sosial, Reintegrasi Sosial
 - 400.9.9.4 Kerjasama meliputi : Kerjasama Pemerintah, Kerjasama Non Pemerintah



- 400.9.10 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - 400.9.10.1 Kesiapsiagaan dan Mitigasi
 - 400.9.10.2 Tanggap Darurat meliputi : Bantuan Darurat, Advokasi Sosial
 - 400.9.10.3 Pemulihan Sosial dan Penguatan Sosial
 - 400.9.10.4 Kerjasama
- 400.9.11 Jaminan Sosial
 - 400.9.11.1 Seleksi dan Verifikasi
 - 400.9.11.2 Asuransi Kesejahteraan Sosial meliputi : Kelembagaan, Pengelolaan Premi
 - 400.9.11.3 Bantuan Langsung dan Tunjangan Berkelanjutan meliputi : Pendampingan dan Penyaluran
 - 400.9.11.4 Kerjasama
- 400.9.12 Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
 - 400.9.12.1 Ketahanan Keluarga
 - 400.9.12.2 Asistensi Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan
 - 400.9.12.3 Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial
 - 400.9.12.4 Kemitraan Dunia Usaha
 - 400.9.12.5 Karang Taruna meliputi : Kelembagaan, Pengembangan Kapasitas
- 400.9.13 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
 - 400.9.13.1 Persiapan Pemberdayaan
 - 400.9.13.2 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
 - 400.9.13.3 Penggalan dan Pengembangan Potensi
 - 400.9.13.4 Keserasian dan Penguatan Komunitas Adat Terpencil
 - 400.9.13.5 Kerjasama Kelembagaan
- 400.9.14 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan
 - 400.9.14.1 Identifikasi dan Analisis
 - 400.9.14.2 Pengembangan Kapasitas
 - 400.9.14.3 Penataan Sosial Lingkungan Kumuh
 - 400.9.14.4 Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas
 - 400.9.14.5 Bantuan Langsung
 - 400.9.14.6 Kerjasama Kelembagaan
- 400.9.15 Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial
 - 400.9.15.1 Penghargaan dan Kesejahteraan Keluarga Pahlawan
 - 400.9.15.2 Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keberintisan
 - 400.9.15.3 Pengembangan Kesetiakawanan Sosial
 - 400.9.15.4 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- 400.10.1 Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah



- 400.10.2 Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - 400.10.2.1 Fasilitas Pengembangan Desa dan Kelurahan
 - 400.10.2.2 Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - 400.10.2.3 Fasilitas Permusyawaratan Desa
 - 400.10.2.4 Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - 400.10.2.5 Pengembangan Kapasitas Desa
- 400.10.3 Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
 - 400.10.3.1 Lembaga Masyarakat
 - 400.10.3.2 Pembangunan Partisipatif
 - 400.10.3.3 Pendataan Potensi Masyarakat
 - 400.10.3.4 Pengembangan Kawasan Perdesaan
 - 400.10.3.5 Pelatihan Masyarakat
- 400.10.4 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
 - 400.10.4.1 Budaya Nusantara
 - 400.10.4.2 Pemberdayaan Perempuan
 - 400.10.4.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 400.10.4.4 Kesejahteraan Sosial
 - 400.10.4.5 Tenaga Kerja Perdesaan
- 400.10.5 Usaha Ekonomi Masyarakat
 - 400.10.5.1 Usaha Pertanian dan Pangan
 - 400.10.5.2 Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
 - 400.10.5.3 Produksi dan Pemasaran
 - 400.10.5.4 Usaha Ekonomi dan Keluarga
 - 400.10.5.5 Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal
- 400.10.6 Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan / Nagari
 - 400.10.6.1 Fasilitas Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
 - 400.10.6.2 Fasilitas Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
 - 400.10.6.3 Fasilitas Prasarana dan Sarana Perdesaan
 - 400.10.6.4 Fasilitas Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
 - 400.10.6.5 Permayarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan
- 400.10.7 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

- 400.11.1 Kebijakan di Bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.11.2 Pertamanan
 - 400.11.2.1 Perencanaan Pertamanan

- 400.11.2.2 Taman Kota
- 400.11.2.3 Tata Hias dan Ornamen Kota
- 400.11.3 Pemakaman
 - 400.11.3.1 Perencanaan Pemakaman
 - 400.11.3.2 Pemakaman
 - 400.11.3.3 Pelayanan Pemakaman
- 400.11.4 Jalur Hijau
 - 400.11.4.1 Perencanaan Jalur Hijau
 - 400.11.4.2 Jalur Hijau Jalan
 - 400.11.4.3 Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
- 400.11.5 Peran Serta Masyarakat
- 400.11.6 Pengawasan dan Penindakan
- 400.11.7 Pengelolaan Data
- 400.11.8 Evaluasi dan Pelaporan

400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

- 400.12.1 Kebijakan di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.12.2 Pendaftaran Penduduk
 - 400.12.2.1 Identitas Penduduk
 - 400.12.2.2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
 - 400.12.2.3 Pindah Datang Penduduk Antar Negara
 - 400.12.2.4 Pendataan Penduduk Rentan
 - 400.12.2.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
- 400.12.3 Pencatatan Sipil
 - 400.12.3.1 Kelahiran dan Kematian
 - 400.12.3.2 Perkawinan dan Perceraian
 - 400.12.3.3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan
 - 400.12.3.4 Pencatatan Kewarganegaraan
 - 400.12.3.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
- 400.12.4 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.2 Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.3 Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.4 Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
- 400.12.5 Pengembangan Kebijakan Kependudukan
 - 400.12.5.1 Kuantitas Penduduk
 - 400.12.5.2 Kualitas Penduduk



- 400.12.5.3 Mobilitas Penduduk
- 400.12.5.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
- 400.12.5.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
- 400.12.6 Penyerasian Kependudukan
 - 400.12.6.1 Indikator Kependudukan
 - 400.12.6.2 Proyeksi Penduduk
 - 400.12.6.3 Perencanaan Kependudukan
 - 400.12.6.4 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah
 - 400.12.6.5 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah

400.13 KELUARGA BERENCANA

- 400.13.1 Kebijakan di Bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.13.2 Analisis Pengaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
 - 400.13.2.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data
 - 400.13.2.2 Evaluasi dan Pelaporan
- 400.13.3 Fasilitas Pengaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
 - 400.13.3.1 Penyiapan Fasilitas
 - 400.13.3.2 Evaluasi dan Pelaporan
- 400.13.4 Profil dan Proyeksi
 - 400.13.4.1 Data Profil dan Proyeksi Penduduk
 - 400.13.4.2 Evaluasi Data Profil dan Proyeksi Penduduk
- 400.13.5 Penetapan Parameter Pengendalian Penduduk
 - 400.13.5.1 Penetapan Sasaran Parameter
 - 400.13.5.2 Evaluasi Sasaran Parameter
- 400.13.6 Pemanfaatan Perencanaan Pengendalian Penduduk
 - 400.13.6.1 Pemanfaatan Profil dan Proyeksi
 - 400.13.6.2 Pemanfaatan Parameter
- 400.13.7 Pengembangan Sistem
 - 400.13.7.1 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
 - 400.13.7.2 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.13.8 Pengembangan Materi
 - 400.13.8.1 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
 - 400.13.8.2 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal

- 400.13.9 Monitoring dan Evaluasi
 - 400.13.9.1 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
 - 400.13.9.2 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.13.10 Analisis Sosial
- 400.13.11 Analisis Ekonomi
- 400.13.12 Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan
- 400.13.13 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
- 400.13.14 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah
- 400.13.15 Jaminan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Keluarga Berencana
- 400.13.16 Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah
 - 400.13.16.1 Standarisasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah
 - 400.13.16.2 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah
- 400.13.17 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Swasta
- 400.13.18 Jaminan dan Ketersediaan Sarana Keluarga Berencana Swasta
- 400.13.19 Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Swasta
 - 400.13.19.1 Standarisasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta
 - 400.13.19.2 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta
- 400.13.20 Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Jalur Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan
 - 400.13.20.1 Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan
 - 400.13.20.2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan
- 400.13.21 Akses dan Kualiatas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan
 - 400.13.21.1 Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan
 - 400.13.21.2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan

- 400.13.22 Kesertaan Keluarga Berencana Pria
 - 400.13.22.1 Peningkatan Akses Keluarga Berencana Pria
 - 400.13.22.2 Peningkatan Partisipasi Keluarga Berencana Pria
- 400.13.23 Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi, dan Anak
- 400.13.24 Pencegahan PMS dan HIV / AIDS
- 400.13.25 Pencegahan Kanker Alat Reproduksi dan Penanggulan Infertilitas
- 400.13.26 Pelembagaan Bina Keluarga Balita dan Anak
 - 400.13.26.1 Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Balita dan Anak
 - 400.13.26.2 Pengembangan Kemitraan Bina Keluarga dan Anak
- 400.13.27 Monitoring dan Evaluasi Bina Keluarga Balita dan Anak
 - 400.13.27.1 Monitoring Bina Keluarga Balita dan Anak
 - 400.13.27.2 Evaluasi dan Pelaporan Bina Keluarga Balita dan Anak
- 400.13.28 Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja
 - 400.13.28.1 Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja Jalur Pendidikan
 - 400.13.28.2 Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja Jalur Masyarakat
- 400.13.29 Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Remaja
 - 400.13.29.1 Monitoring Bina Ketahanan Remaja
 - 400.13.29.2 Evaluasi dan Pelaporan Bina Ketahanan Remaja
- 400.13.30 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.30.1 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia
 - 400.13.30.2 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Rentan
- 400.13.31 Pelembagaan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.31.2 Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.32 Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.32.1 Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.32.2 Evaluasi Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

- 400.13.33 Pengembangan Program Usaha Ekonomi Keluarga
- 400.13.34 Peningkatan Teknologi dan Permodalan Usaha Ekonomi Keluarga
- 400.13.35 Peningkatan Manajemen Usaha Ekonomi Keluarga
 - 400.13.35.1 Pengembangan Administrasi dan Keuangan Kelompok Usaha Ekonomi
 - 400.13.35.2 Pengembangan Pemasaran Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga
- 400.13.36 Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Keluarga
- 400.13.37 Pengembangan Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
- 400.13.38 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.38.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.38.2 Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
- 400.13.39 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.39.1 Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.39.2 Evaluasi dan Pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
- 400.13.40 Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi
 - 400.13.40.1 Perencanaan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi
 - 400.13.40.2 Evaluasi dan Pelaporan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi
- 400.13.41 Advokasi dan Pencitraan
- 400.13.42 Komunikasi, Informasi dan Edukasi
 - 400.13.42.1 Promosi
 - 400.13.42.2 Sarana Produksi Media Komunikasi
 - 400.13.42.3 Produk Media Komunikasi
- 400.13.43 Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Pusat dan Provinsi
- 400.13.44 Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota
 - 400.13.44.1 Pengembangan Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota
 - 400.13.44.2 Penguatan Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota
- 400.13.45 Hubungan dengan Lembaga Non Pemerintah
 - 400.13.45.1 Pengembangan Hubungan dengan Lembaga Non Pemerintah

- 400.13.45.2 Penguatan Hubungan dengan Lembaga Non Pemerintah
- 400.13.46 Tenaga Lini Lapangan
 - 400.13.46.1 Pengembangan Tenaga Lini Lapangan
 - 400.13.46.2 Monitoring dan Evaluasi Tenaga Lini Lapangan
- 400.13.47 Institusi Masyarakat Pedesaan
 - 400.13.47.1 Pengembangan Institusi Masyarakat Pedesaan
 - 400.13.47.2 Monitoring dan Evaluasi Institusi Masyarakat Pedesaan
- 400.13.48 Mekanisme Operasional Lini Lapangan
 - 400.13.48.1 Pengembangan Mekanisme Operasional Lini Lapangan
 - 400.13.48.2 Monitoring dan Evaluasi Mekanisme Operasional Lini Lapangan
- 400.13.49 Pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan
 - 400.13.49.1 Perumusan Pola Sistem Pencatatan dan Pelaporan
 - 400.13.49.2 Monitoring dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan
- 400.13.50 Pengumpulan dan Pengolahan Data
- 400.13.51 Analisis dan Evaluasi
 - 400.13.51.1 Analisis dan Evaluasi Pengendalian Penduduk
 - 400.13.51.2 Analisis dan Evaluasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- 400.13.52 Sistem Aplikasi dan Bank Data
 - 400.13.52.1 Pengembangan Sistem Aplikasi
 - 400.13.52.2 Pengelolaan Bank Data
- 400.13.53 Infrastruktur Teknologi Informasi
 - 400.13.53.1 Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi
 - 400.13.53.2 Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi
- 400.13.54 Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi
 - 400.13.54.1 Dokumentasi dan Perpustakaan
 - 400.13.54.2 Pengelolaan Situs BKKBN dan Media Konferensi

400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT

- 400.14.1 Keprotokolan
 - 400.14.1.1 Penyelenggaraan Acara Kedinasan (Upacara, Pelantikan, Peresmian, dan Jamuan termasuk Acara Peringatan Hari-Hari Besar)



- 400.14.1.2 Buku Tamu Keprotokolan
- 400.14.1.3 Agenda Kegiatan Pimpinan Daerah
- 400.14.1.4 Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri
- 400.14.2 Daftar Nama / Alamat Kantor / Pejabat
- 400.14.3 Dokumentasi/ Liputan Kegiatan Dinas Pimpinan, Acara Kedinasan dan Peristiwa-Peristiwa Bidang Masing-Masing, dalam berbagai Media : Kertas, Foto / Video / Rekaman Suara / Multi Media
- 400.14.4 Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi Kelembagaan
 - 400.14.4.1 Kliping Koran
 - 400.14.4.2 Brosur / Leaflet / Poster / Plakat
 - 400.14.4.3 Pengumuman / Pemberitahuan
- 400.14.5 Hubungan antar Lembaga dan Pemerintahan Daerah
 - 400.14.5.1 Hubungan antar Lembaga Pemerintah
 - 400.14.5.2 Hubungan dengan Organisasi Sosial / LSM
 - 400.14.5.3 Hubungan dengan Perusahaan
 - 400.14.5.4 Hubungan dengan Perguruan Tinggi / Sekolah, termasuk Magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG) / Praktek Kerja Lapangan (PKL)
 - 400.14.5.5 Forum Kehumasan
 - 400.14.5.6 Hubungan dengan Media Massa
- 400.14.6 Dengar Pendapat / Hearing DPRD
- 400.14.7 Bahan / Materi Pidato / Sidang Muspida Provinsi / Kota / Kabupaten
- 400.14.8 Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal
- 400.14.9 Publikasi Melalui Media Cetak Maupun Elektronik
- 400.14.10 Pameran / Sayemara / Lomba / Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan
- 400.14.11 Penghargaan / Tanda Kenang-Kenangan
- 400.14.12 Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf

500. PEREKONOMIAN

500.1 KETAHANAN PANGAN

- 500.1.1 Kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah
- 500.1.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - 500.1.2.1 Ketersediaan Pangan
 - 500.1.2.2 Akses Pangan
 - 500.1.2.3 Kerawanan Pangan
- 500.1.3 Distribusi dan Cadangan Pangan
 - 500.1.3.1 Distribusi Pangan
 - 500.1.3.2 Harga Pangan
 - 500.1.3.3 Cadangan Pangan
- 500.1.4 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
 - 500.1.4.1 Konsumsi Pangan
 - 500.1.4.2 Penganekaragaman Pangan
 - 500.1.4.3 Keamanan Pangan Segar
- 500.1.5 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
 - 500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan
 - 500.1.5.2 Penghargaan Ketahanan Pangan
- 500.1.6 Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
- 500.1.7 Bimbingan Teknis
- 500.1.8 Evaluasi

500.2 PERDAGANGAN

- 500.2.1 Kebijakan di Bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.2.2 Perdagangan Dalam Negeri
 - 500.2.2.1 Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
 - 500.2.2.2 Bina Usaha Jasa Perdagangan
 - 500.2.2.3 Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
 - 500.2.2.4 Informasi Perusahaan
 - 500.2.2.5 Pelaku Pasar
 - 500.2.2.6 Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
 - 500.2.2.7 Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
 - 500.2.2.8 Pengembangan Produk Lokal
 - 500.2.2.9 Pencitraan Produk Dalam Negeri
 - 500.2.2.10 Pengembangan Sarana Distribusi
 - 500.2.2.11 Pengelolaan Sarana Distribusi
 - 500.2.2.12 Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik

- 500.2.2.13 Informasi dan Bimbingan Teknis
Penyedia Jasa Logistik
- 500.2.2.14 Informasi Pasar
- 500.2.2.15 Informasi Hasil Industri
- 500.2.2.16 Barang Strategis
- 500.2.2.17 Bahan Pokok Agro

- 500.2.3 Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
 - 500.2.3.1 Kelembagaan dan Informasi Standar
 - 500.2.3.2 Kerjasama Standarisasi
 - 500.2.3.3 Perumusan dan Penetapan Standar
 - 500.2.3.4 Tata Usaha
 - 500.2.3.5 Kerjasama, Informasi dan Publikasi
 - 500.2.3.6 Analisa Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
 - 500.2.3.7 BimbinganKonsumen dan Pelaku Usaha
 - 500.2.3.8 Fasilitas Kelembagaan
 - 500.2.3.9 Produk Pertambangan dan Aneka Industri
 - 500.2.3.10 Produk Pertanian, Kimia dan Kehutanan
 - 500.2.3.11 Jasa
 - 500.2.3.12 Kerjasama
 - 500.2.3.13 Sarana dan Kerjasama
 - 500.2.3.14 Kelembagaan dan Penilaian
 - 500.2.3.15 UTP dan Standar Ukuran
 - 500.2.3.16 Pengawasan
 - 500.2.3.17 Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
 - 500.2.3.18 Balai Pengujian UTP

- 500.2.4 Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 500.2.4.1 Pengkajian Pasar
 - 500.2.4.2 Pengawasan Transaksi
 - 500.2.4.3 Pengawasan Keuangan dan Audit
 - 500.2.4.4 Pengkajian Pasar
 - 500.2.4.5 Pengembangan Pasar
 - 500.2.4.6 Sistem Informasi
 - 500.2.4.7 Pembinaan Pasar Lelang dan SistemResi Gudang
 - 500.2.4.8 Pengawasan Pasar Lelang
 - 500.2.4.9 Pengawasan Sistem Gudang

- 500.2.5 Bimbingan Teknis
- 500.2.6 Evaluasi

500.3 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

- 500.3.1 Kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

- 500.3.2 Kelembagaan Koperasi dan UKM
 - 500.3.2.1 Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
 - 500.3.2.2 Tata Laksana Koperasi dan UKM
 - 500.3.2.3 Keanggotaan Koperasi
 - 500.3.2.4 Pengendalian dan Akuntabilitas

500.3.3	Produksi	
500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	
500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan	
500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan	
500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan	
500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha	
500.3.4	Pembiayaan	
500.3.4.1	Program Pendanaan	
500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam	
500.3.4.3	Urusan Permodalan	
500.3.4.4	Asuransi Jasa Keuangan	
500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit	
500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)	
500.3.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha	
500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri	
500.3.5.2	Ekspor dan Impor	
500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran	
500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha	
500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis	
500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM	
500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia	
500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan	
500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM	
500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat	
500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM	
500.3.6.5	Advokasi	
500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	
500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu	
500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha	
500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)	
500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK	
500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis	
500.3.8	Pengkajian Sumber daya UKMK	
500.3.8.1	Penelitian Koperasi	
500.3.8.2	Penelitian UKM	
500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya	
500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK	
500.3.9	Kerjasama Hubungan Antar Lembaga	
500.3.10	Pedagang Kaki Lima (PKL)	
500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan	
500.3.10.2	Sarana dan Prasarana	
500.3.11	Monitoring dan Evaluasi	

500.4 KEHUTANAN

- 500.4.1 Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.4.2 Penyuluhan
 - 500.4.2.1 Program Kerja Penyuluhan
 - 500.4.2.2 Materi Penyuluhan
 - 500.4.2.3 Program Penyuluhan
 - 500.4.2.4 Sarana Penyuluhan
 - 500.4.2.5 Pengembangan Tenaga Penyuluhan
 - 500.4.2.6 Pelaksanaan Penyuluhan
 - 500.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat
 - 500.4.2.8 Deseminasi
 - 500.4.2.9 Evaluasi dan Laporan
- 500.4.3 Planologi Kehutanan
 - 500.4.3.1 Perencanaan Makro Kawasan Hutan
 - 500.4.3.2 Penataan Ruang Kawasan Hutan
 - 500.4.3.3 Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
 - 500.4.3.4 Pengukuhan dan Penataan Kawasan Hutan
 - 500.4.3.5 Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
 - 500.4.3.6 Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
 - 500.4.3.7 Inventarisasi Sumber Daya Hutan
 - 500.4.3.8 Pemantauan Sumber Daya Hutan
 - 500.4.3.9 Pemetaan Sumber Daya Hutan
 - 500.4.3.10 Jaringan Data Spasial
 - 500.4.3.11 Penggunaan Kawasan Hutan
 - 500.4.3.12 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan
 - 500.4.3.13 Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
 - 500.4.3.14 Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
 - 500.4.3.15 Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
 - 500.4.3.16 Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
- 500.4.4 Bina Usaha Kehutanan
 - 500.4.4.1 Data Areal HPH/HTI/IUPHHK
 - 500.4.4.2 SK HPH/HTI/IUPHHK
 - 500.4.4.3 Kerjasama
 - 500.4.4.4 Pembatalan/Penolakan
 - 500.4.4.5 Perpanjangan
 - 500.4.4.6 Modal dan Peralatan
 - 500.4.4.7 Investasi Industri Peralatan
 - 500.4.4.8 Peralatan
 - 500.4.4.9 Tenaga Kerja
 - 500.4.4.10 Pemegang Saham
 - 500.4.4.11 Neraca Perusahaan
 - 500.4.4.12 Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
 - 500.4.4.13 Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)

500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja
500.4.4.17	Produksi Kayu
500.4.4.18	Produksi Non Kayu
500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.21	Industri Non Kayu
500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp
500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan
500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi
500.4.4.25	Pemblokiran
500.4.4.26	Denda
500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha
500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/ Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil
500.4.4.34	Produksi Hutan Alam
500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri
500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman /Rencana Kerja Usaha Produksi
500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman
500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan
500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan
500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur
500.4.5	Standardisasi dan Lingkungan
500.4.5.1	Standardisasi
500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan
500.4.5.3	Pengembangan
500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan
500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan
500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan
500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan



	500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	
	500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi
	500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
	500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
	500.4.6.4	Konservasi Keanekaragaman Hayati
	500.4.6.5	Kawasan Konservasi
	500.4.6.6	Pengamanan Hutan
	500.4.6.7	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
	500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan
	500.4.6.9	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
		Bina Cinta Alam
		Kader Konservasi Sumber Daya Alam
		Data Organisasi Pencinta Alam dan Kader Konservasi SDA
500.4.7	Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial	
	500.4.7.1	Pengelolaan Benih
	500.4.7.2	Kebun Benih
	500.4.7.3	Tegakan Benih
	500.4.7.4	Pengadaan Benih
	500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih
	500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih
	500.4.7.7	Pembibitan
	500.4.7.8	Lalu Lintas Angkutan Benih
	500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan
	500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih
	500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
	500.4.7.12	Tanaman Reboisasi
	500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
	500.4.7.14	Perhutanan Sosial
	500.4.7.15	Pengendalian Perladangan
500.4.8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	
	500.4.8.1	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan
	500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi Penelitian
	500.4.8.3	Diseminasi
	500.4.8.4	Gelar Teknologi
	500.4.8.5	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan



500.5 PERIKANAN

- 500.5.1 Kebijakan di Bidang Perikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.5.2 Perikanan Tangkap
 - 500.5.2.1 Data dan Statistik Perikanan Tangkap
 - 500.5.2.2 Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
 - 500.5.2.3 Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
 - 500.5.2.4 Pendaftaran Kapal Perikanan
 - 500.5.2.5 Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
 - 500.5.2.6 Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
 - 500.5.2.7 Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
 - 500.5.2.8 Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
 - 500.5.2.9 Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
 - 500.5.2.10 Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
 - 500.5.2.11 Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
 - 500.5.2.12 Kelembagaan Usaha Penangkapan
 - 500.5.2.13 Investasi dan Permodalan Usaha
 - 500.5.2.14 Kenelayanan
 - 500.5.2.15 Pembinaan Pengelolaan Usaha
 - 500.5.2.16 Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
- 500.5.3 Perikanan Budidaya
 - 500.5.3.1 Potensi Lahan dan Air
 - 500.5.3.2 Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
 - 500.5.3.3 Pengelolaan Induk Perbenihan Ikan Air Tawar
 - 500.5.3.4 Perbenihan Skala Kecil
 - 500.5.3.5 Informasi dan Distribusi Pembenihan
 - 500.5.3.6 Budidaya Air Tawar
 - 500.5.3.7 Budidaya Ikan Hias
 - 500.5.3.8 Sertifikasi Budidaya Perikanan
 - 500.5.3.9 Data dan Statistik Perikanan Budidaya
 - 500.5.3.10 Hama dan Penyakit Ikan
 - 500.5.3.11 Perlindungan Lingkungan Budidaya
 - 500.5.3.12 Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
 - 500.5.3.13 Kewirausahaan Budidaya
 - 500.5.3.14 Pelayanan Usaha Budidaya
 - 500.5.3.15 Kelembagaan dan Ketenagakerjaan
 - 500.5.3.16 Promosi Usaha dan Budidaya
- 500.5.4 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - 500.5.4.1 Standarisasi Pengolahan Hasil
 - 500.5.4.2 Pengembangan Produk
 - 500.5.4.3 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - 500.5.4.4 Industri Pengolahan
 - 500.5.4.5 Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil

	500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
	500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias
	500.5.4.8	Pengembangan Industri
	500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
	500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
	500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.17	Pengembangan Ekspor
	500.5.4.18	Pengembangan Impor
	500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.20	Pelayanan Usaha
	500.5.4.21	Kemitraan Usaha
	500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.4.23	Investasi dan Permodalan
	500.5.4.24	Informasi dan Promosi
500.5.5	-	
	500.5.5.1	-
	500.5.5.2	-
	500.5.5.3	-
	500.5.5.4	-
	500.5.5.5	-
	500.5.5.6	-
	500.5.5.7	-
	500.5.5.8	-
	500.5.5.9	-
	500.5.5.10	-
	500.5.5.11	-
	500.5.5.12	-
	500.5.5.13	-
	500.5.5.14	-
	500.5.5.15	-
	500.5.5.16	-
	500.5.5.17	-
	500.5.5.18	-
	500.5.5.19	-
	500.5.5.20	-
500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Perikanan	
	500.5.6.1	-
	500.5.6.2	-
	500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran

500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya
500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan Darat dan Kawasan Konservasi
500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan
500.5.6.7	-
500.5.6.8	-
500.5.6.9	-
500.5.6.10	-
500.5.6.11	-
500.5.6.12	-
500.5.6.13	Sistem Pemantauan
500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber daya Kelautan
500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan
500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur
500.5.6.17	Pengawasan
500.5.6.18	Penyidikan
500.5.6.19	-
500.5.6.20	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
500.5.7	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
500.5.7	Karantina Ikan
500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan
500.5.7.2	Penahanan
500.5.7.3	Pengasingan
500.5.7.4	Pengamatan
500.5.7.5	Pengakuan
500.5.7.6	Penolakan
500.5.7.7	Pemusnahan
500.5.7.8	Persyaratan Lalu Lintas Pemasukan
500.5.7.9	Persyaratan Lalu Lintas Pengeluaran
500.5.7.10	Permohonan Sertifikat
500.5.7.11	Pemasukan Formulir
500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat
500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
500.5.7.14	Surat Perintah
500.5.7.15	Rekomendasi
500.5.7.16	Penutupan Suatu Area
500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan
500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional
500.5.7.20	Instalasi karantina Sementara
500.5.7.21	Lokasi Karantina

500.6 PERTANIAN

500.6.1	Kebijakan di Bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.6.2	Perlindungan Hortikultura
500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah
500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat

	500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura
	500.6.2.4	Dampak Iklim dan Persyaratan Teknis
500.6.3	Perbenihan Hortikultura	
	500.6.3.1	Penilaian Varietas
	500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih
	500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura
500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan	
	500.6.4.1	Basis Data Lahan
	500.6.4.2	Pengendalian Lahan
	500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
	500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
	500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi	
	500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air
	500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
	500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
	500.6.5.4	Kelembagaan
500.6.6	Pembiayaan Pertanian	
	500.6.6.1	Pembiayaan Program
	500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
	500.6.6.3	Pembiayaan Agribisnis
	500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis
500.6.7	Pupuk Pestisida	
	500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
	500.6.7.2	Pupuk Anorganik
	500.6.7.3	Pestisida
	500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian	
	500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan	
	500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
	500.6.9.2	Produksi Benih Serealia
	500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Aneka Kacang dan Umbi
	500.6.9.4	Kelembagaan Benih
500.6.10	Budidaya Serealia	
	500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa
	500.6.10.2	Pada Tadah Hujan dan Lahan Kering

- | | | |
|----------|---|--|
| | 500.6.10.3 | Jagung |
| | 500.6.10.4 | Serealia lain |
| 500.6.11 | Budidaya Aneka Kacang dan Umbi | |
| | 500.6.11.1 | Kedelai |
| | 500.6.11.2 | Ubi Kayu |
| | 500.6.11.3 | Aneka Kacang |
| | 500.6.11.4 | Aneka Umbi |
| 500.6.12 | Tanaman Pangan | |
| | 500.6.12.1 | Pengelolaan Data Organisasi
Penggangu Tumbuhan |
| | 500.6.12.2 | Dampak Perubahan Iklim |
| | 500.6.12.3 | Teknologi Pengendalian Organisme
Penggangu Tumbuhan |
| | 500.6.12.4 | Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu |
| 500.6.13 | Pascapanen Tanaman Pangan | |
| | 500.6.13.1 | Padi |
| | 500.6.13.2 | Jagung dan Serealia Alin |
| | 500.6.13.3 | Kedelai dan Aneka Kacang |
| | 500.6.13.4 | Aneka Umbi |
| 500.6.14 | Pengolahan Hasil Pertanian | |
| | 500.6.14.1 | Tanaman Pangan |
| | 500.6.14.2 | Holtikultura |
| | 500.6.14.3 | Perkebunan |
| | 500.6.14.4 | Peternakan |
| 500.6.15 | Mutu dan Standarisasi | |
| | 500.6.15.1 | Standardisasi |
| | 500.6.15.2 | Penerapan dan Pengawasan Jaminan
Mutu |
| | 500.6.15.3 | Akreditasi dan Kelembagaan |
| | 500.6.15.4 | Kerjasama dan Harmonisasi |
| 500.6.16 | Pengembangan Usaha dan Investasi | |
| | 500.6.16.1 | Kemitraan dan Kewirausahaan |
| | 500.6.16.2 | Investasi |
| | 500.6.16.3 | Promosi Dalam Negeri |
| | 500.6.16.4 | Promosi Luar Negeri |
| 500.6.17 | Pemasaran Domestik | |
| | 500.6.17.1 | Informasi Pasar |
| | 500.6.17.2 | Pemantauan Pasar dan Stabilisasi
Harga |
| | 500.6.17.3 | Sarana dan Kelembagaan Pasar |
| | 500.6.17.4 | Jaringan Pemasaran |
| 500.6.18 | Administrasi Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan,
antara lain : Rencana Kerja, TOR/Proposal,
Pembentukan Tim Kerja dan Surat Menyurat | |
| 500.6.19 | Hasil Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan | |
| | 500.6.19.1 | Hasil Penelitian dan Pengembangan |
| | 500.6.19.2 | Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan
Strategi |

- 500.6.20 Diseminasi
- 500.6.21 Publikasi Hasil Penelitian/Pengkajian
 - 500.6.21.1 Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demplot, Seminar, Lokakarya, Temu Karya, Workshop
 - 500.6.21.2 Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding dan Publikasi lainnya
- 500.6.22 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan
- 500.6.23 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
- 500.6.24 Data Penelitian dan Pengembangan
- 500.6.25 Evaluasi Penelitian/Pengkajian dan Pengembangan
- 500.6.26 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - 500.6.26.1 Hak Cipta
 - 500.6.26.2 Hak Paten Sederhana
 - 500.6.26.3 Hak Paten Biasa
 - 500.6.26.4 Hak Merek
 - 500.6.26.5 Pendaftaran Varietas Tanaman
 - 500.6.26.6 Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
 - 500.6.26.7 Permohonan HKI yang ditolak
- 500.6.27 Pelayanan Perijinan Pertanian
 - 500.6.27.1 Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
 - 500.6.27.2 Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
 - 500.6.27.3 Sarana III (bidang bibit, karkas, daging dan jeroan, pakan ternak, obat hewan dan teknis sumber daya genetik ternak)
- 500.6.28 Pelayanan Hukum
 - 500.6.28.1 Sertifikasi
 - 500.6.28.2 Pertimbangan Hukum
- 500.6.29 Karantina Pertanian
 - 500.6.29.1 Karantina Tumbuhan
 - 500.6.29.2 Karantina Hewan
- 500.6.30 Bimbingan Teknis
- 500.6.31 Evaluasi

500.7 PETERNAKAN

- 500.7.1 Kebijakan di Bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

- 500.7.2 Pernakan dan Kesehatan Hewan
 - 500.7.2.1 Perbibitan Ternak, Antara lain :
Produksi Bibit Ternak Ruminansia,
Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia,
Penilaian dan Pelepasan Bibit Ternak,
Surat Rekomendasi dan Persetujuan
Pemasukan/Pengeluaran
 - 500.7.2.2 Pakan Ternak
 - 500.7.2.3 Budidaya Ternak
 - 500.7.2.4 Kesehatan Hewan, Antara lain :
Pengamatan Penyakit Hewan,
Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan,
Kelembagaan dan Sumber Daya
Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat
Hewan
 - 500.7.2.5 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan
Pascapanen, Antara lain : Pascapanen,
Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary
dan Keamanan Produk Hewan,
Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan,
Pengujian dan Sertifikasi Produk
Hewan, Surat Rekomendasi dan
Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran
- 500.7.3 Bimbingan Teknis
- 500.7.4 Evaluasi

500.8 PERKEBUNAN

- 500.8.1 Kebijakan di Bidang Perkebunan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah
- 500.8.2 Tanaman Semusim
 - 500.8.2.1 Identifikasi dan Pendayagunaan
Sumber Daya Tanaman Semusim
 - 500.8.2.2 Perbenihan Tanaman Semusim
 - 500.8.2.3 Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman
Semusim
 - 500.8.2.4 Pemberdayaan Tanaman Semusim
- 500.8.3 Tanaman Rempah dan Penyegar
 - 500.8.3.1 Identifikasi dan Pendayagunaan
Sumber Daya Tanaman Rempah dan
Penyegar
 - 500.8.3.2 Perbenihan Tanaman Rempah dan
Penyegar
 - 500.8.3.3 Budidaya Tanaman Rempah dan
Penyegar
 - 500.8.3.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan
Tanaman Rempah dan Penyegar
- 500.8.4 Tanaman Tahunan
 - 500.8.4.1 Identifikasi dan Pendayagunaan
Sumber Daya Tanaman Tahunan



- 500.8.4.2 Perbenihan Tanaman Tahunan
- 500.8.4.3 Budidaya Tanaman Tahunan
- 500.8.4.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan
- 500.8.5 Perlindungan Perkebunan
 - 500.8.5.1 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan
 - 500.8.5.2 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar
 - 500.8.5.3 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan
 - 500.8.5.4 Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
- 500.8.6 Pascapanen dan Pembinaan Usaha
 - 500.8.6.1 Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
 - 500.8.6.2 Pascapanen Tanaman Tahunan
 - 500.8.6.3 Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
 - 500.8.6.4 Gangguan Usaha Dan Penanganan Konflik
- 500.8.7 Bimbingan Teknis Perkebunan
- 500.8.8 Evaluasi Perkebunan

500.9 PERINDUSTRIAN

- 500.9.1 Kebijakan di Bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.9.2 Iklim Usaha dan Kerja Sama
 - 500.9.2.1 Industri Manufaktur
 - 500.9.2.2 Industri Agro
 - 500.9.2.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
 - 500.9.2.4 Industri Kecil dan Menengah
- 500.9.3 Promosi Industri
 - 500.9.3.1 Industri Manufaktur
 - 500.9.3.2 Industri Agro
 - 500.9.3.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
 - 500.9.3.4 Industri Kecil dan Menengah
- 500.9.4 Standarisasi dan Teknologi
 - 500.9.4.1 Industri Manufaktur
 - 500.9.4.2 Industri Agro

	500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.5	Hak dan Kekayaan Intelektual	
	500.9.5.1	Industri Manufaktur
	500.9.5.2	Industri Agro
	500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.6	Industri Hijau	
	500.9.6.1	Industri Manufaktur
	500.9.6.2	Industri Agro
	500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.7	Analisis Kerja Sama	Industri Unggulan Kabupaten/Kota
500.9.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	
500.9.9	Pengembangan Infrastruktur	Pendukung Pengembangan Kawasan Industri
500.9.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	
500.9.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional	
500.9.12	Standarisasi	
	500.9.12.1	Standar
	500.9.12.2	Penyiapan Penerapan
	500.9.12.3	Infrastruktur Standar
500.9.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri	
	500.9.13.1	Kebijakan Industri
	500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif
	500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial
500.9.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup	
	500.9.14.1	Industri Hijau
	500.9.14.2	Lingkungan Hidup
	500.9.14.3	Energi
500.9.15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual	
	500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
	500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
	500.9.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
500.9.16	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri	

500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- 500.10.1 Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.10.2 Rekomendasi Kegeologian
 - 500.10.2.1 Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami dan Gerakan Tanah
 - 500.10.2.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
 - 500.10.2.3 Pertambangan
 - 500.10.2.4 Panas Bumi
 - 500.10.2.5 Geosains
 - 500.10.2.6 Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)
 - 500.10.2.7 Kelayakan Lingkungan
- 500.10.3 Penelitian Kegeologian
 - 500.10.3.1 Administrasi Pelaksanaan Penelitian
 - 500.10.3.2 Administrasi Tenaga Penelitian
 - 500.10.3.3 Administrasi Penggunaan Peralatan Penelitian
 - 500.10.3.4 Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji/Kalibrasi
 - 500.10.3.5 Hasil Penelitian dan Penyelidikan Kegeologian
 - 500.10.3.6 Sumber Daya Geologi
 - 500.10.3.7 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
 - 500.10.3.8 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
 - 500.10.3.9 Survei Geologi
- 500.10.4 Inventarisasi dan Evaluasi Kegeologian
 - 500.10.4.1 Sumber Daya Geologi
 - 500.10.4.2 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
 - 500.10.4.3 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
 - 500.10.4.4 Survei Geologi
 - 500.10.4.5 Konservasi
- 500.10.5 Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi
 - 500.10.5.1 Peta Potensi Sebaran
 - 500.10.5.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
 - 500.10.5.3 Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta Kebakaran Batubara
 - 500.10.5.4 Survei Geologi
- 500.10.6 Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
 - 500.10.6.1 Rencana Induk Jaringan Bumi
 - 500.10.6.2 Rencana dan Realisasi Investasi
 - 500.10.6.3 Penetapan Harga Minyak Mentah
 - 500.10.6.4 Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) Minyak dan Gas Bumi



500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNB
500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Kompenen Dalam Negeri (TKDN)
500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri
500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.7	Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)
500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain : Pemanfaatan data migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, izin pengiriman data ke luar negeri, unitisasi lapangan minyak dan gas bumi, rekomendasi pengalihan interest, rekomendasi penyisihan wilayah kerja minyak dan gas bumi, penyiapan dokumen pengakhiran kontrak, laporan data survei seismik, laporan data pemboran sumur eksplorasi per semester, laporan data pemboran sumur eksplorasi tahunan)
500.10.7.3	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain : Rekomendasi penggunaan data eksplorasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, reprocessing), penetapan pengusahaan minyak bumi dari sumur tua, penetapan pengusahaan lapangan produksi yang dikembalikan kepada Pemerintah, buku cadangan minyak dan gas bumi, data cadangan strategis/ penyangga minyak dan gas bumi, laporan hasil pemantauan data produksi minyak dan gas bumi, laporan hasil inventarisasi mutu minyak dan gas bumi)
500.10.7.4	Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)
500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak KKS
500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas
500.10.7.7	Partisipasi Interest
500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan
500.10.8	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
500.10.8.1	Perumusan Pedoman, Prosedur, Layanan serta Pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, Antara lain : Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (izin / rekomendasi / penandasahan), Pengawasan

	500.10.8.2	Fasilitasi dan Pertimbangan Pelanggaran
	500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
500.10.9	Teknik dan Lingkungan	
	500.10.9.1	Perumusan Pelaksanaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI)/Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
	500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), Antara lain : Berkas Permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT
	500.10.9.3	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS) / Procedure Qualification Record (PQR)
	500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
	500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Antara lain : Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
	500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, Antara lain : Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
	500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
	500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, Antara lain : Dokumen Permohonan Pengajuan Persetujuan Penunjukkan Calon Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi, Surat Undangan Presentasi, Surat Persetujuan /Pengesahan Penunjukan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi
	500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja, Antara lain : Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
	500.10.9.10	Usaha Penunjang
500.10.10	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi



500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.11	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
500.10.11.1	Usaha Wilayah Kerja Panas Bumi
500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga
500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi
500.10.11.7	Road Map di Bidang EBT
500.10.12	Panas Bumi
500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak
500.10.12.5	Perizinan Penggunaan Gudang Bahan Peledak
500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair
500.10.12.7	Persetujuan Sertifikasi Welding Prosedure Specification (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan Kualifikasi Juru Las Qualification Record (PQR) dan Kualifikasi Juru Las
500.10.12.8	Penerbitan Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
500.10.12.11	Penetapan Kapasitas Usaha Panas Bumi
500.10.12.12	Penetapan Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi
500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
500.10.13	Bioenergi
500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BNN)
500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor-Impor



- 500.10.13.4 Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
- 500.10.13.5 Evaluasi/Revisi HIP BBN
- 500.10.13.6 Database Pengusahaan Bioenergi
- 500.10.13.7 Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik
- 500.10.13.8 Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
- 500.10.13.9 Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
- 500.10.14 Aneka Energi
 - 500.10.14.1 Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
 - 500.10.14.2 Penetapan Kapasitas Usaha
 - 500.10.14.3 Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 - 500.10.14.4 Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
 - 500.10.14.5 Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
- 500.10.15 Konservasi Energi
 - 500.10.15.1 Audit Energi melalui Program Kemitraan Konservasi Energi
 - 500.10.15.2 Monitoring Implementasi Hasil Audit Energi melalui Program Kemitraan Konservasi Energi
 - 500.10.15.3 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Manajemen Energi di Pengguna Energi di atas 6.000 TOE
 - 500.10.15.4 Pengawasan Sertifikasi Label dan Tanda Hemat Energi pada Lampu Swabalast
 - 500.10.15.5 Penyusunan Daftar Peralatan/Teknologi Efisiensi
 - 500.10.15.6 Penyusunan Emisi Energi Gas Rumah Kaca
 - 500.10.15.7 Pemberian Insentif dan Disinsentif Konservasi Energi
 - 500.10.15.8 Profil Investasi Efisiensi Energi
 - 500.10.15.9 Investment Grade Audit (IGA)
 - 500.10.15.10 Bimbingan Teknis Bidang EBTKE
- 500.10.16 Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE
 - 500.10.16.1 Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
 - 500.10.16.2 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
 - 500.10.16.3 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE
 - 500.10.16.4 Evaluasi Program Kerja
- 500.10.17 Bina Program Tenaga Listrik
 - 500.10.17.1 Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik, Antara lain : Dokumen Grant/Hibah/ LoanAgreement Luar Negeri, Monitoring Loan Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik, Laporan

		Penanganan Permasalahan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik, Laporan Kegiatan Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik
500.10.17.2		Pengembangan Listrik Perdesaan, Antara lain : Data Program Listrik Perdesaan, Data Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan Evaluasi Listrik Perdesaan, Listrik untuk Masyarakat tidak mampu
500.10.17.3		Data dan Informasi Ketenagalistrikan
500.10.18	Bina Usaha Ketenagalistrikan	
500.10.18.1		Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, Antara lain : Pelayanan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IO, IUPL-S dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data Laporan Berkala Pemegang Izin
500.10.18.2		Harga dan Subsidi Listrik
500.10.18.3		Hubungan Komersial Tenaga Listrik
500.10.18.4		Perlindungan Konsumen Listrik, Antara lain : Penanganan Pengaduan Konsumen Listrik, Dokumen Pengawasan Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik, Dokumen Evaluasi Realisasi Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik, Dokumen Evaluasi Pemberian Kompensasi Pinalti Tingkat Mutu Pelayanan PT PLN (Persero)
500.10.19	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	
500.10.19.1		Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan
500.10.19.2		Penyiapan Kompetensi dan Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
500.10.19.3		Usaha Penunjang Ketenagalistrikan, Antara lain : Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.19.4		Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan, Antara lain : Dokumen Forum Keselamatan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik, Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sektor Ketenagalistrikan, Laporan Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan, Dokumen Perhitungan Faktor Emisi Clean Development Mechansim (CDM)
500.10.20	Sertifikasi	
500.10.20.1		Dokumen Sertifikasi Produk Peralatan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik



500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)
500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi
500.10.21	Akreditasi Ketenagalistrikan
500.10.22	Standardisasi Kompetensi
500.10.23	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan
500.10.23.1	Perumusan Rancangan SNI Bidang Ketenagalistrikan
500.10.23.2	Forum Konsensus Rancangan SNI Bidang Ketenagalistrikan
500.10.23.3	Program Pemberlakuan SNI Wajib Bidang Ketenagalistrikan
500.10.23.4	Dokumen Pengawasan Penerapan SNI Wajib Bidang Ketenagalistrikan
500.10.24	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
500.10.24.1	Klasifikasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
500.10.24.2	Kualifikasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
500.10.24.3	Dokumen Penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
500.10.24.4	Laporan Berkala Pemegang Penunjukan LIT
500.10.24.5	Laporan Hasil Pengawasan Penunjukan
500.10.25	Bina Program Mineral dan Batubara
500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara
500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara
500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara
500.10.25.4	Data dan Informasi Mineral dan Batubara
500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara
500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui Lelang Reguler
500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara



- 500.10.26 Pembinaan Pengusahaan Mineral
- 500.10.26.1 Ketenagakerjaan
 - 500.10.26.2 Pemberdayaan Masyarakat sekitar Tambang
 - 500.10.26.3 Penyelesaian Perselisihan Usaha Pertambangan Mineral
 - 500.10.26.4 Rekomendasi Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
 - 500.10.26.5 Laporan/Data Kegiatan Eksplorasi Mineral
 - 500.10.26.6 Pengawasan Produksi dan Pemasaran Mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif dan mineral jarang)
 - 500.10.26.7 Perizinan Usaha Pertambangan Mineral
 - 500.10.26.8 Kontrak karya (KK)
 - 500.10.26.9 Pengelolaan Barang Kontrak karya (KK)
 - 500.10.26.10 Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
 - 500.10.26.11 Persetujuan Perubahan Saham Direksi, Komisaris, pada Perusahaan Mineral
 - 500.10.26.12 Teguran kepada Pengusahaan Kontrak Karya (KK)
 - 500.10.26.13 Tanggapan kepada Pemerintah Daerah terkait Usaha Pertambangan Mineral
 - 500.10.26.14 Pedoman/Petunjuk Teknis Pertambangan Mineral termasuk Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir
 - 500.10.26.15 Pelaporan Usaha Pertambangan Mineral
 - 500.10.26.16 Penghargaan Usaha Pertambangan Mineral
 - 500.10.26.17 Penerbitan Sertifikat Clearand Clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
- 500.10.27 Pembinaan Pengusahaan Batubara
- 500.10.27.1 Ketenagakerjaan
 - 500.10.27.2 Pemberdayaan Masyarakat sekitar Tambang
 - 500.10.27.3 Penyelesaian Perselisihan Usaha Pertambangan Batubara
 - 500.10.27.4 Rekomendasi Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara
 - 500.10.27.5 Laporan/Data Kegiatan Eksplorasi Batubara
 - 500.10.27.6 Pengawasan Produksi dan Pemasaran Batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut), Antara lain : Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara
 - 500.10.27.7 Perizinan Usaha Pertambangan Batubara
 - 500.10.27.8 Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)

- 500.10.27.9 Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), Antara lain : Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist)
- 500.10.27.10 Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
- 500.10.27.11 Persetujuan Perubahan Saham Direksi, Komisaris, pada Perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
- 500.10.27.12 Teguran kepada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
- 500.10.27.13 Tanggapan kepada Pemerintah Daerah terkait Usaha Pertambangan Batubara
- 500.10.27.14 Pedoman / Petunjuk Teknis Pertambangan Batubara termasuk Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir
- 500.10.27.15 Pelaporan Usaha Pertambangan Batubara
- 500.10.27.16 Penghargaan Usaha Pertambangan Batubara
- 500.10.27.17 Penerbitan Sertifikat Clearand Clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara
- 500.10.28 Penerimaan Negara
 - 500.10.28.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - 500.10.28.2 Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPNBP)
 - 500.10.28.3 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBPNBP
- 500.10.29 Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
 - 500.10.29.1 Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia) / RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), Antara lain : Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional
 - 500.10.29.2 Pengawasan Standardisasi
 - 500.10.29.3 Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang
 - 500.10.29.4 Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, Antara lain : Laporan Kecelakaan Tambang/ Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 500.10.29.5 Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang, Antara lain : Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan
 - 500.10.29.6 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
 - 500.10.29.7 Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)



- 500.10.29.8 Rekomendasi Bahan Kimia
- 500.10.29.9 Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Antara lain : Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/ Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang
- 500.10.29.10 Laporan Berkala Teknik dan Lingkungan Pertambangan / Laporan Tahunan, Antara lain : Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) Pelaksanaan Reklamasi
- 500.10.29.11 Pemberian Penghargaan, Antara lain : Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselamatan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan
- 500.10.29.12 Pengawasan Lingkungan Pertambangan
- 500.10.29.13 Usaha Jasa Mineral dan Batubara
- 500.10.29.14 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Mineral dan Batubara
- 500.10.29.15 Rekomendasi Teknis, Antara lain : Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi
- 500.10.29.16 Persetujuan Teknis, Antara lain : Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi
- 500.10.29.17 Pengawasan Teknis
- 500.10.29.18 Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara
- 500.10.29.19 Pembinaan Teknis dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Antara lain : Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis
- 500.10.30 Program Penelitian dan Pengembangan
 - 500.10.30.1 Rencana Penelitian dan Pengembangan
 - 500.10.30.2 Pengembangan dan Inovasi
 - 500.10.30.3 Dokumen Penerapan / Pemanfaatan / Pendayagunaan / Replikasi / Prototipe / Hasil Penelitian/ Pengkajian / Pengembangan / Inovasi
 - 500.10.30.4 Advokasi dan Fasilitasi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
 - 500.10.30.5 Diseminasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - 500.10.30.6 Pembinaan Penelitian / Pengembangan Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - 500.10.30.7 Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- | | |
|--------------|--|
| 500.10.30.8 | Data dan Informasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi |
| 500.10.30.9 | Master Proceeding/Jurnal Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi |
| 500.10.30.10 | Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) |
| 500.10.30.11 | Forum Komunikasi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi |
| 500.10.30.12 | Layanan Jasa Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi |
| 500.10.30.13 | Sertifikasi Personil Peneliti Bidang Sumber Daya Mineral |
| 500.10.31 | Sarana Litbang |
| 500.10.31.1 | Administrasi Penggunaan Peralatan |
| 500.10.31.2 | Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi |
| 500.10.32 | Afiliasi |
| 500.10.32.1 | Proyek Percontohan |
| 500.10.32.2 | Promosi dan Layanan Jasa Teknologi |
| 500.10.32.3 | Pembinaan Penelitian dan Pengembangan |
| 500.10.32.4 | Penyajian Informasi |
| 500.10.33 | Penelitian dan Pengembangan Kegeologian |
| 500.10.33.1 | - |
| 500.10.33.2 | - |
| 500.10.33.3 | - |
| 500.10.33.4 | - |
| 500.10.34 | Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan gas Bumi |
| 500.10.34.1 | Teknologi Eksplorasi |
| 500.10.34.2 | Teknologi Eksploitasi |
| 500.10.34.3 | Laboratorium |
| 500.10.34.4 | Study |
| 500.10.34.5 | Teknologi Proses |
| 500.10.34.6 | Teknologi Aplikasi Produk |
| 500.10.34.7 | Teknologi Gas |
| 500.10.35 | Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara |
| 500.10.35.1 | Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya |
| 500.10.35.2 | Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Mineral |
| 500.10.35.3 | Teknologi Pemanfaatan Batubara |
| 500.10.36 | Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan |
| 500.10.36.1 | Energi Baru Terbarukan |
| 500.10.36.2 | Teknologi Ketenagalistrikan |
| 500.10.36.3 | Lingkungan dan Konservasi Energi |

- 500.10.36.4 Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi

500.11 PERHUBUNGAN

- 500.11.1 Kebijakan di Bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.11.2 Jaringan Prasarana dan Pelayanan
 - 500.11.2.1 Penentuan Lokasi Terminal Barang Tipe Pengumpul dan Tipe Penunjang
 - 500.11.2.2 Penentuan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A, Tipe B dan Tipe C
 - 500.11.2.3 Penetapan Lokasi Terminal Barang Utama
 - 500.11.2.4 Standar Pelayanan Minimal Pengoperasian Terminal
 - 500.11.2.5 Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota/Provinsi
 - 500.11.2.6 Jaringan Lintas pada Jaringan Jalan Primer
 - 500.11.2.7 Penetapan Kelas Jalan Primer
 - 500.11.2.8 Kualifikasi Teknis Petugas Terminal
 - 500.11.2.9 Jaringan Transportasi Jalan Sekunder
- 500.11.3 Pengembangan Transportasi Jalan
 - 500.11.3.1 Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 500.11.3.2 Pengembangan Transportasi Jalan
- 500.11.4 Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 500.11.4.1 Pengesahan Hasil Uji Tipe Kendaraan Bermotor
 - 500.11.4.2 Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor
 - 500.11.4.3 Sertifikasi Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor
 - 500.11.4.4 Akreditasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor
- 500.11.5 Teknologi Kendaraan Bermotor
 - 500.11.5.1 Sertifikasi Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor
 - 500.11.5.2 Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor
 - 500.11.5.3 Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor
 - 500.11.5.4 Harmonisasi dan Standardisasi Regulasi Kendaraan Bermotor
- 500.11.6 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - 500.11.6.1 Analisa Dampak Lalu Lintas Jalan Nasional di Luar Kawasan Perkotaan
 - 500.11.6.2 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Nasional

- 500.11.7 Perlengkapan Jalan
 - 500.11.7.1 Pedoman Teknis Perlengkapan Jalan
 - 500.11.7.2 Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
 - 500.11.7.3 Akreditasi Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor
 - 500.11.7.4 Kualifikasi Teknis Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor
 - 500.11.7.5 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional
- 500.11.8 Angkutan Penumpang
 - 500.11.8.1 Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi
 - 500.11.8.2 Izin Trayek Angkutan Penumpang untuk Trayek Lintas batas Negara
 - 500.11.8.3 Izin Trayek Antar Kota Antar Provinsi
 - 500.11.8.4 Izin Operasi Angkutan Pariwisata dan Angkutan Penumpang untuk tidak dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya Bersifat Lintas Batas Negara dan Antar Kota/ Provinsi
 - 500.11.8.5 Penilaian Kinerja Perusahaan Angkutan Umum
 - 500.11.8.6 Pemberian Subsidi Angkutan Umum
 - 500.11.8.7 Angkutan Perintis
 - 500.11.8.8 Penghargaan Perusahaan Angkutan Umum
- 500.11.9 Angkutan Barang
 - 500.11.9.1 Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 500.11.9.2 Tarif Angkutan Barang
 - 500.11.9.3 Izin Operasi Angkutan Barang Tertentu
 - 500.11.9.4 Pembinaan Angkutan Barang
 - 500.11.9.5 Izin Dispensasi Angkutan Jalan
- 500.11.10 Monitoring Operasional
 - 500.11.10.1 Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 500.11.10.2 Pengawasan, Penertiban dan Pemberian Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Operasional Kendaraan Angkutan Umum yang menjadi Kewenangan
 - 500.11.10.3 Berkas Pelanggaran Perda
- 500.11.11 Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - 500.11.11.1 Pedoman Teknis
 - 500.11.11.2 Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
 - 500.11.11.3 Bimtek PPNS
 - 500.11.11.4 Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

- 500.11.12 Analisa dan Evaluasi Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.12.1 Pendataan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.12.2 Analisis serta Informasi Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
- 500.11.13 Pengembangan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.13.1 Jaringan dan Penetapan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)
 - 500.11.13.2 Pengembangan Sistem Informasi manajemen (SIM) Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
- 500.11.14 Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
- 500.11.15 Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.15.1 Perawatan dan Pemeliharaan Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.15.2 Pengawasan dan Registrasi Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
- 500.11.16 Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.16.1 Perencanaan dan Pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.16.2 Pemberian Sertifikasi Pelabuhan Penyeberangan
 - 500.11.16.3 Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan di Lintas Nasional dan Internasional
 - 500.11.16.4 Penyelenggaraan, Pemeliharaan, Perawatan dan Perbaikan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
- 500.11.17 Kualifikasi Teknis Petugas Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
- 500.11.18 Manajemen lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.18.1 Manajemen Lalu Lintas
 - 500.11.18.2 Tata cara berlalu Lintas di Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.18.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai dan Danau

- 500.11.18.4 Sertifikasi Inspektur Sungai dan Danau dan Pejabat Pemberangkatan Angkutan Sungai dan Danau
- 500.11.19 Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.19.1 Pengerukan Alur Pelayaran Sungai, Danau dan Kolam Pelabuhan Penyeberangan
 - 500.11.19.2 Penetapan Kelas Alur dan Peta Alur Pelayaran Sungai dan Danau
 - 500.11.19.3 Perambuan Sungai, Danau dan Penyeberangan
- 500.11.20 Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.20.1 Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.20.2 Persetujuan Operasi Kapal Penyeberangan di Lintas Nasional dan Internasional
- 500.11.21 Tarif dan Keperintisan
 - 500.11.21.1 Perhitungan Tarif, Pemantauan tarif Angkutan dan Jasa Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.21.2 Kriteria dan Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan
- 500.11.22 Bina Sistem Transportasi Perkotaan
 - 500.11.22.1 Jaringan Transportasi Perkotaan
 - 500.11.22.2 Transportasi Perkotaan yang Berbasis Jalan, Jalan Rel dan Perairan Daratan
 - 500.11.22.3 Transportasi Perkotaan untuk Kawasan Perkotaan yang melebihi satu Wilayah Administrasi Provinsi
- 500.11.23 Lalu Lintas Perkotaan
 - 500.11.23.1 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan
 - 500.11.23.2 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan di Jalan Nasional dalam Kawasan Perkotaan
 - 500.11.23.3 Penanganan Lalu Lintas Perkotaan Berbasis Teknologi di wilayah
- 500.11.24 Angkutan Perkotaan
 - 500.11.24.1 Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dalam Trayek
 - 500.11.24.2 Jaringan Trayek Perkotaan
 - 500.11.24.3 Penentuan dan Pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Perkotaan dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi



- 500.11.25 Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan
 - 500.11.25.1 Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan tidak dalam Trayek untuk
 - 500.11.25.2 Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan yang menghubungkan Antar Simpul (bandara, pelabuhan, stasiun dan terminal) di Kawasan Perkotaan yang melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi
 - 500.11.25.3 Penentuan dan Pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Perkotaan tidak dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi
- 500.11.26 Dampak Transportasi Perkotaan
 - 500.11.26.1 Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan Berwawasan Lingkungan
 - 500.11.26.2 Penanganan Dampak Transportasi di Kawasan Perkotaan
 - 500.11.26.3 Masterplan Pengembangan Teknologi Transportasi Ramah Lingkungan
 - 500.11.26.4 Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas di jalan Nasional dalam Kawasan Kota
 - 500.11.26.5 Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas di jalan Nasional dalam Kawasan Perkotaan
 - 500.11.26.6 Masterplan Transportasi Perkotaan
- 500.11.27 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan
 - 500.11.27.1 Monitoring dan Evaluasi Data Kecelakaan
 - 500.11.27.2 Kualifikasi Unit Pengkajian
 - 500.11.27.3 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
- 500.11.28 Pengembangan Keselamatan
 - 500.11.28.1 Program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.28.2 Harmonisasi Kebijakan
- 500.11.29 Promosi dan Kemitraan Keselamatan
 - 500.11.29.1 Promosi Keselamatan : Penyuluhan, Publikasi dan Destinasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.29.2 Kemitraan Keselamatan Antar Lembaga dan Masyarakat di Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

- 500.11.30 Bina Keselamatan Angkutan Umum
 - 500.11.30.1 Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum
 - 500.11.30.2 Keselamatan Awak Angkutan Umum dan Awak Kapal Sungai dan Danau
- 500.11.31 Audit Keselamatan
 - 500.11.31.1 Pedoman Audit Keselamatan Sarana, Prasarana Sumber Daya Manusia
 - 500.11.31.2 Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Jalan dan Pelaku Transportasi Jalan dan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.31.3 Audit Faktor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan serta laik Fungsi Jalan
- 500.11.32 Inspeksi Keselamatan
 - 500.11.32.1 Pedoman Keselamatan
 - 500.11.32.2 Inspeksi Keselamatan Sarana, Prasarana, Sumber Daya Manusia dan Pelaku Transportasi Jalan dan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.32.3 Investasi Kecelakaan Sungai, Danau dan Penyeberangan serta Laik Fungsi Jalan
- 500.11.33 Parkir
 - 500.11.33.1 Surat Tugas Juru Parkir
 - 500.11.33.2 Izin Tempat Khusus Parkir Swasta
 - 500.11.33.3 Surat Tugas TKP Pemerintah

500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 500.12.1 Kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.12.2 Telekomunikasi
 - 500.12.2.1 Layanan Jaringan Telekomunikasi
 - 500.12.2.2 Layanan Jasa Telekomunikasi
 - 500.12.2.3 Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
 - 500.12.2.4 Kelayakan Sistem Telekomunikasi
- 500.12.3 Penyiaran
 - 500.12.3.1 Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
 - 500.12.3.2 Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
- 500.12.4 Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal
 - 500.12.4.1 Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah
 - 500.12.4.2 Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah
 - 500.12.4.3 Layanan Khusus Penyiaran

	500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal
	500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur
500.12.5	Pengendalian Informatika	
	500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
	500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
	500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
	500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban
500.12.6	E – Government	
	500.12.6.1	Tata Kelola e-Government
	500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Government
	500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government
	500.12.6.4	Aplikasi Layanan Pemerintahan
	500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik
500.12.7	E – Business	
	500.12.7.1	Tata Kelola e-Business
	500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business
	500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business
	500.12.7.4	Aplikasi Layanane-Business
500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat	
	500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
	500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika	
	500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
	500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna
	500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak
	500.12.9.4	Industri Konten Multimedia
500.12.10	Keamanan Informasi	
	500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi
	500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi
	500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap darurat Keamanan Informasi
	500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan
	500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi
500.12.11	Komunikasi Publik	
	500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik
	500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik
	500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik
500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi	
	500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum dan Keamanan
	500.12.12.2	Informasi Perekonomian
	500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat

- 500.12.13 Pengelolaan Media Publik
 - 500.12.13.1 Media Cetak
 - 500.12.13.2 Media Online
 - 500.12.13.3 Media Luar Ruang dan Audio Visual
- 500.12.14 Kemitraan Komunikasi
 - 500.12.14.1 Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
 - 500.12.14.2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha
 - 500.12.14.3 Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
- 500.12.15 Infrastruktur Informatika
 - 500.12.15.1 Jaringan
 - 500.12.15.2 Piranti Teknologi Informatika
 - 500.12.15.3 Keamanan Informatika
- 500.12.16 Sistem dan Data
 - 500.12.16.1 Portal dan Konten
 - 500.12.16.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data
 - 500.12.16.3 Pengembangan Aplikasi
- 500.12.17 Pusat Kerja Sama
 - 500.12.17.1 Kerja Sama Daerah
 - 500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral
- 500.12.18 Pusat Informatika dan Hubungan Masyarakat
 - 500.12.18.1 Pelayanan Informasi
 - 500.12.18.2 Hubungan Masyarakat
 - 500.12.18.3 Bimbingan Teknis
- 500.12.19 Evaluasi

500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- 500.13.1 Kebijakan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.13.2 Pengembangan Destinasi Wisata
 - 500.13.2.1 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
 - 500.13.2.2 Pengembangan Daya Tarik Wisata
 - 500.13.2.3 Industri Pariwisata
 - 500.13.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
 - 500.13.2.5 Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konversi, Insentif dan Event
- 500.13.3 Pemasaran Pariwisata
 - 500.13.3.1 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
 - 500.13.3.2 Promosi Pariwisata Luar Negeri
 - 500.13.3.3 Promosi Pariwisata Dalam Negeri
 - 500.13.3.4 Pencitraan Indonesia

- 500.13.4 Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
 - 500.13.4.1 Pengembangan Industri Perfilman
 - 500.13.4.2 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
 - 500.13.4.3 Pengembangan Seni Rupa
- 500.13.5 Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK
 - 500.13.5.1 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
 - 500.13.5.2 Desain dan Arsitektur
 - 500.13.5.3 Kerja Sama dan Fasilitas
- 500.13.6 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 500.13.6.1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata
 - 500.13.6.2 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
 - 500.13.6.3 Pengembangan SDM Kepariwisata
 - 500.13.6.4 Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

500.14 STATISTIK

- 500.14.1 Kebijakan di Bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.14.2 Sensus Penduduk, Pertanian dan Ekonomi
 - 500.14.2.1 Perencanaan
 - 500.14.2.2 Persiapan, Antara lain : Penyusunan Rancangan Organisasi Kegiatan Sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan Konsep dan Definisi, Penyusunan Metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan Buku Pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan Peta Wilayah Kerja dan Muatan Peta Wilayah, Penyusunan Pedoman Sosialisasi, Sosialisasi Kegiatan kepada Stakeholder dan Sumber Data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan Pelatihan Instruktur (TOT), Pelaksanaan Pelatihan Petugas, Penyusunan Program Pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan Petugas Pengolahan, Perancangan Tabel, Pelaksanaan Ujicoba
 - 500.14.2.3 Pelaksanaan Lapangan
 - 500.14.2.4 Pengolahan, Antara lain : Pengelolaan Dokumen (penerimaan / pengiriman, pengelompokan / Batching), Pemeriksaan Dokumen dan Pengkodean

		(Editing/ Coding), Perekaman Data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan Tabulasi, Laporan Konsistensi Tabulasi
	500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
	500.14.2.6	Diseminasi Hasil Sensus
500.14.3	Survei	
	500.14.3.1	Perencanaan
	500.14.3.2	Persiapan
	500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan, Antara lain : Pelaksanaan Listing, Pemilihan Sampel, Pengumpulan Data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring Kualitas
	500.14.3.4	Pengolahan, Antara lain : Pengelolaan Dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan Batching), Pemeriksaan Dokumen dan Pengkodean (Editing/ Coding), Perekaman Data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan Tabulasi, Laporan Konsistensi Tabulasi
	500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei, Antara lain : Pembahasan Angka Hasil Pengolahan, Penyusunan
	500.14.3.6	Diseminasi Hasil Survei
500.14.4	Konsolidasi Data Statistik	
	500.14.4.1	Kompilasi Data
	500.14.4.2	Analisis Data
	500.14.4.3	Penyusunan Publikasi
500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei dan Konsolidasi Data Statistik	

500.15 KETENAGAKERJAAN

500.15.1	Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja
	500.15.2.1 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
	500.15.2.2 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
500.15.3	Pengembangan Standarisasi Kompetensi
	500.15.3.1 Penerapan Standar Kompetensi
	500.15.3.2 Pengembangan Standarisasi Kompetensi
	500.15.3.3 Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
	500.15.3.4 Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan

	500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja	
	500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
	500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
	500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
	500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerja Sama Antar Lembaga
500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan	
	500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
	500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
	500.15.5.3	Tenaga Pelatihan
	500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM dan Tenaga Pelatihan
500.15.6	Bina Pemagangan	
	500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri
	500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri
	500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan
	500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan
500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan	
	500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerja Sama Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
	500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
	500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan
500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja	
	500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja
	500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja
	500.15.8.3	Bursa Kerja
	500.15.8.4	Analisis Jabatan
500.15.9	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
	500.15.9.1	Antar Kerja
	500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus
	500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
	500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja
500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal	
	500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
	500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya
	500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna
	500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerja Sama Antar Lembaga

- | | | |
|-------------|---|--|
| 500.15.11 | Standardisasi Profesi | |
| 500.15.11.1 | Sistem Informasi dan Registrasi | |
| 500.15.11.2 | Pembakuan Akreditasi | |
| 500.15.12 | Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi | |
| 500.15.12.1 | Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama Bersama | |
| 500.15.12.2 | Perjanjian Kerja | |
| 500.15.12.3 | Kesejahteraan Pekerja | |
| 500.15.12.4 | Analisis Diskriminasi Syarat Kerja | |
| 500.15.13 | Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial | |
| 500.15.13.1 | Organisasi Pekerja dan Pengusaha | |
| 500.15.13.2 | Kelembagaan Hubungan Industrial | |
| 500.15.13.3 | Pemasyarakatan Hubungan Industrial | |
| 500.15.14 | Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | |
| 500.15.14.1 | Pengupahan | |
| 500.15.14.2 | Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja | |
| 500.15.15 | Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial | |
| 500.15.15.1 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial | |
| 500.15.15.2 | Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | |
| 500.15.15.3 | Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | |
| 500.15.16 | Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | |
| 500.15.16.1 | Pengawasan Norma Kerja | |
| 500.15.16.2 | Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat | |
| 500.15.16.3 | Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja | |
| 500.15.17 | Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak | |
| 500.15.17.1 | Pengawasan Norma Kerja Perempuan | |
| 500.15.17.2 | Pengawasan Norma Kerja Anak | |
| 500.15.17.3 | Kerjasama Lintas Sektoral | |
| 500.15.17.4 | Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak | |
| 500.15.18 | Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja | |
| 500.15.18.1 | Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan | |
| 500.15.18.2 | Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran | |
| 500.15.18.3 | Pengawasan Norma Kesehatan Kerja | |

- 500.15.18.4 Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
- 500.15.18.5 Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
- 500.15.19 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan
- 500.15.20 Bina Penegakan Hukum
 - 500.15.20.1 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
 - 500.15.20.2 Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
 - 500.15.20.3 Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - 500.15.20.4 Kerjasama Penegakan Hukum
- 500.15.21 Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 500.15.21.1 Analisis dan Standardisasi Bidang K3
 - 500.15.21.2 Hasil Kajian, Perekrayasaan dan Penerapan Teknologi dan Alih Teknologi K3
 - 500.15.21.3 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3
 - 500.15.21.4 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
- 500.15.22 Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.1 Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.2 Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.3 Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.4 Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.5 Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.6 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

500.16 PENANAMAN MODAL

- 500.16.1 Kebijakan di Bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.16.2 Perencanaan Penanaman Modal
 - 500.16.2.1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
 - 500.16.2.2 Perencanaan Industri Manufaktur
 - 500.16.2.3 Perencanaan Jasa dan Kawasan
 - 500.16.2.4 Perencanaan Infrastruktur
- 500.16.3 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 500.16.3.1 Deregulasi Penanaman Modal
 - 500.16.3.2 Pengembangan Potensi Daerah
 - 500.16.3.3 Pemberdayaan Usaha



- 500.16.3.4 Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
- 500.16.3.5 Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
- 500.16.3.6 Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
- 500.16.4 Promosi Penanaman Modal
 - 500.16.4.1 Pengembangan Promosi
 - 500.16.4.2 Analisis Strategi Promosi
 - 500.16.4.3 Fasilitasi Promosi Luar Negeri
 - 500.16.4.4 Promosi Sektoral
 - 500.16.4.5 Fasilitasi Promosi Daerah
 - 500.16.4.6 Pameran dan Sarana Promosi
- 500.16.5 Kerja Sama Penanaman Modal
 - 500.16.5.1 Kerja Sama Bilateral dan Multilateral
 - 500.16.5.2 Kerja Sama Regional
 - 500.16.5.3 Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
- 500.16.6 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 500.16.6.1 Pemantauan Penanaman Modal
 - 500.16.6.2 Data Realisasi Penanaman Modal
 - 500.16.6.3 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
 - 500.16.6.4 Fasilitasi Penyelesaian Masalah
 - 500.16.6.5 Pengawasan Penanaman Modal
 - 500.16.6.6 Pencabutan / Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
- 500.16.7 Pelayanan Penanaman Modal
 - 500.16.7.1 Pelayanan Aplikasi
 - 500.16.7.2 Pelayanan Perijinan
 - 500.16.7.3 Pelayanan Konsultasi Perijinan
 - 500.16.7.4 Pelayanan Non Perijinan
 - 500.16.7.5 Pelayanan Fasilitas

500.17 PERTANAHAN

- 500.17.1 Kebijakan di Bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.17.2 Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan
 - 500.17.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah
 - 500.17.2.2 Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
 - 500.17.2.3 Data dan Informasi Pertanahan
 - 500.17.2.4 Advokasi dan Pengendalian
- 500.17.3 Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah
 - 500.17.3.1 Penatagunaan Tanah
 - 500.17.3.2 Data dan Pemetaan Tematik
 - 500.17.3.3 Penguatan Atas Tanah
- 500.17.4 Sengketa Tanah
 - 500.17.4.1 Pengkajian dan Penanganan Sengketa
 - 500.17.4.2 Advokasi dan Pengendalian

500.18 TRANSMIGRASI

- 500.18.1 Kebijakan di Bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.18.2 Penyediaan Tanah Transmigrasi
 - 500.18.2.1 Fasilitas Pengadaan Tanah
 - 500.18.2.2 Pengurusan Legalitas Tanah
 - 500.18.2.3 Dokumentasi Pertanahan
 - 500.18.2.4 Advokasi Pertanahan
- 500.18.3 Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
 - 500.18.3.1 Penyiapan Lahan
 - 500.18.3.2 Penyiapan Sarana
 - 500.18.3.3 Penyiapan Prasarana
 - 500.18.3.4 Evaluasi Kelayakan Permukiman
- 500.18.4 Fasilitas Penempatan Transmigrasi
 - 500.18.4.1 Penyiapan Calon Transmigrasi
 - 500.18.4.2 Penyiapan Perpindahan
 - 500.18.4.3 Pelaksanaan Perpindahan
 - 500.18.4.4 Penataan dan Adaptasi
- 500.18.5 Partisipasi Masyarakat
 - 500.18.5.1 Promosi dan Motivasi
 - 500.18.5.2 Kerjasama Kelembagaan
 - 500.18.5.3 Kerjasama Antar Daerah
 - 500.18.5.4 Pelayanan Investasi
- 500.18.6 Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
 - 500.18.6.1 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
 - 500.18.6.2 Bina Sistem Informasi
 - 500.18.6.3 Perencanaan Pengembangan Kawasan
 - 500.18.6.4 Perencanaan Pengembangan Masyarakat
 - 500.18.6.5 Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
- 500.18.7 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat
 - 500.18.7.1 Bantuan Pangan dan Kesehatan
 - 500.18.7.2 Fasilitas Sosial Budaya
 - 500.18.7.3 Pengembangan Kelembagaan
 - 500.18.7.4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
- 500.18.8 Pengembangan Usaha
 - 500.18.8.1 Kewirausahaan
 - 500.18.8.2 Produksi
 - 500.18.8.3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran
 - 500.18.8.4 Lembaga Ekonomi dan Permodalan
- 500.18.9 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
 - 500.18.9.1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana



- 500.18.9.2 Pengembangan Sarana
- 500.18.9.3 Pengembangan Prasarana
- 500.18.9.4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
- 500.18.10 Penyerasian Lingkungan
 - 500.18.10.1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
 - 500.18.10.2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
 - 500.18.10.3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
 - 500.18.10.4 Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan



600. PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

600.1 PEKERJAAN UMUM

- 600.1.1 Kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 600.1.2 Penatagunaan Sumber Daya Air
 - 600.1.2.1 Perencanaan Wilayah Sungai
 - 600.1.2.2 Kelembagaan
 - 600.1.2.3 Pemanfaatan Sumber Daya Air
 - 600.1.2.4 Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
- 600.1.3 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
 - 600.1.3.1 Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
 - 600.1.3.2 Manajemen Mutu
 - 600.1.3.3 Informasi dan Data Sumber Daya Air
 - 600.1.3.4 Keterpaduan Pemrogaman
- 600.1.4 Pengelolaan Sumber Daya Air
 - 600.1.4.1 Pengelolaan Sungai dan Pantai
 - 600.1.4.2 Pengelolaan Irigasi dan Rawa
 - 600.1.4.3 Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ dan Embung
 - 600.1.4.4 Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
- 600.1.5 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
 - 600.1.5.1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
 - 600.1.5.2 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa
 - 600.1.5.3 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ dan Embung
 - 600.1.5.4 Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku
- 600.1.6 -
 - 600.1.6.1 -
 - 600.1.6.2 -
 - 600.1.6.3 -
 - 600.1.6.4 -
 - 600.1.6.5 -
- 600.1.7 Pengembangan Jaringan Jalan
 - 600.1.7.1 Keterpaduan Perencanaan
 - 600.1.7.2 Sistem Jaringan Jalan
 - 600.1.7.3 Lingkungan dan Keselamatan Jalan
- 600.1.8 Pembangunan Jalan
 - 600.1.8.1 Standar dan Pedoman
 - 600.1.8.2 Manajemen Konstruksi
 - 600.1.8.3 Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan dan Drainage

- 600.1.8.4 Pengelolaan Geoteknik dan manajemen Lereng
- 600.1.9 Preservasi Jalan
 - 600.1.9.1 Standar dan Pedoman
 - 600.1.9.2 Perencanaan Teknis
 - 600.1.9.3 Teknik Rekonstruksi
 - 600.1.9.4 Teknik Pemeliharaan Jalan
- 600.1.10 Pengelolaan Jembatan
 - 600.1.10.1 Standar dan Pedoman
 - 600.1.10.2 Perencanaan Teknis
 - 600.1.10.3 Teknik Jembatan
 - 600.1.10.4 Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
- 600.1.11 Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah
 - 600.1.11.1 Bimbingan Teknik Jalan Daerah
 - 600.1.11.2 Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
 - 600.1.11.3 Pembinaan Teknik jalan Bebas Hambatan
- 600.1.12 Pengaturan Jalan Tol
 - 600.1.12.1 Persiapan Pengusahaan Jalan Tol
 - 600.1.12.2 Pengadaan Investasi Jalan Tol
 - 600.1.12.3 Teknik Pengaturan Jalan Tol
 - 600.1.12.4 Pengambilalihan Hak Pengusahaan Jalan Tol
- 600.1.13 Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
 - 600.1.13.1 Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
 - 600.1.13.2 Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
- 600.1.14 Pengembangan Kawasan Permukiman
 - 600.1.14.1 Perencanaan Teknis
 - 600.1.14.2 Kawasan Permukiman Perkotaan
 - 600.1.14.3 Kawasan Permukiman Pedesaan
 - 600.1.14.4 Kawasan Permukiman Khusus
 - 600.1.14.5 Kelembagaan
- 600.1.15 Pembinaan Penataan Bangunan
 - 600.1.15.1 Perencanaan Teknis
 - 600.1.15.2 Penataan Bangunan Gedung
 - 600.1.15.3 Pengelolaan Rumah Negara
 - 600.1.15.4 Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
 - 600.1.15.5 Kelembagaan
- 600.1.16 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 600.1.16.1 Perencanaan Teknis
 - 600.1.16.2 Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan

- 600.1.16.3 Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan
- 600.1.16.4 Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
- 600.1.16.5 Kelembagaan
- 600.1.16.6 Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
- 600.1.16.7 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
- 600.1.17 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
 - 600.1.17.1 Perencanaan Teknis
 - 600.1.17.2 Pengelolaan Air Limbah
 - 600.1.17.3 Pengelolaan Persampahan
 - 600.1.17.4 Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
 - 600.1.17.5 Kelembagaan
 - 600.1.17.6 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
- 600.1.18 Pemantauan dan Evaluasi

600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- 600.2.1 Kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 600.2.2 Perencanaan Pembiayaan Perumahan
 - 600.2.2.1 Keterpaduan Perencanaan
 - 600.2.2.2 Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar
 - 600.2.2.3 Kemitraan
- 600.2.3 Pola Pembiayaan Perumahan
 - 600.2.3.1 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
 - 600.2.3.2 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
 - 600.2.3.3 Pola Investasi Perumahan
- 600.2.4 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
 - 600.2.4.1 Sumber Pembiayaan Primer
 - 600.2.4.2 Sumber Pembiayaan Sekunder
 - 600.2.4.3 Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan lainnya
 - 600.2.4.4 Sistem Pembiayaan Perumahan
 - 600.2.4.5 Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
- 600.2.5 Perencanaan Penyediaan Perumahan
 - 600.2.5.1 Keterpaduan Perencanaan
 - 600.2.5.2 Analisa Teknik
 - 600.2.5.3 Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
 - 600.2.5.4 Kemitraan dan Kelembagaan
- 600.2.6 Penyediaan Rumah Susun
 - 600.2.6.1 Perencanaan Teknik

	600.2.6.2	Penyediaan	
	600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan dan	
		Pemanfaatan	
	600.2.6.4	Pengelolaan	
600.2.7	Penyediaan Rumah Khusus		
	600.2.7.1	Perencanaan Teknik	
	600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah	
		Tapak Khusus	
	600.2.7.3	Bimbingan Teknis dan Supervisi	
	600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah	
		Swadaya	
	600.2.7.5	Perencanaan Teknik	
	600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan	
		Rumah Tidak Layak Huni	
	600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan	
600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial		
	600.2.8.1	Perencanaan Teknik	
	600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum	
	600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang	
	600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan	
600.2.9	Investasi Infrastruktur		
	600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi	
		Infrastruktur	
	600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur	
	600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi	
		Infrastruktur	
	600.2.9.4	Pasar Infrastruktur	
600.2.10	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		
	600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan	
	600.2.10.2	Kontrak Konstruksi	
	600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan	
	600.2.10.4	Manajemen Mutu	
600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi		
	600.2.11.1	Kelembagaan	
	600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi	
	600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi	
		Dalam Negeri	
	600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi	
600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi		
	600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi	
	600.2.12.2	Penerapan Kompetensi	
	600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	
	600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas	
600.2.13	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa		
	Konstruksi		
	600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama	
	600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	

- 600.2.14 Peningkatan Jasa Konstruksi
 - 600.2.14.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
 - 600.2.14.2 Pelaksanaan Pengendalian Mutu
- 600.2.15 Penerapan Teknologi Konstruksi
 - 600.2.15.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi
 - 600.2.15.2 Pengembangan Materi
 - 600.2.15.3 Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
- 600.2.16 Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR)
 - 600.2.16.1 Antar Sektor
 - 600.2.16.2 Antar Wilayah
- 600.2.17 Pengembangan Kawasan Strategis
 - 600.2.17.1 Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
 - 600.2.17.2 Pengembangan Infrastruktur Antar Kawasan Strategis
- 600.2.18 Pengembangan Kawasan Perkotaan
 - 600.2.18.1 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
 - 600.2.18.2 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
 - 600.2.18.3 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan
 - 600.2.18.4 Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan
 - 600.2.18.5 Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)
- 600.2.19 Pemantauan dan Evaluasi

600.3 TATA RUANG (TATA KOTA)

- 600.3.1 Kebijakan di Bidang Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 600.3.2 Perencanaan
 - 600.3.2.1 Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
 - 600.3.2.2 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
 - 600.3.2.3 Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten
 - 600.3.2.4 Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
 - 600.3.2.5 Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
 - 600.3.2.6 Rencana Teknis Prasarana Kota

- 600.3.2.7 Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kota
- 600.3.3 Pemanfaatan dan Pengendalian
 - 600.3.3.1 Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
 - 600.3.3.2 Izin Pemanfaatan Ruang
 - 600.3.3.3 Pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang
- 600.3.4 Pemetaan
 - 600.3.4.1 Peta Dasar
 - 600.3.4.2 Survey Pemetaan Ruang Darat
 - 600.3.4.3 Survey Pemetaan Ruang Air
 - 600.3.4.4 Survey Pemetaan Ruang Udara

600.4 LINGKUNGAN HIDUP

- 600.4.1 Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 600.4.2 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - 600.4.2.1 Inventarisasi, Penerapan Ekoregion dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
 - 600.4.2.2 Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
- 600.4.3 Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor
 - 600.4.3.1 Evaluasi Penerapan
 - 600.4.3.2 Perencanaan Lingkungan Hidup
- 600.4.4 Ekonomi Lingkungan
- 600.4.5 Dampak Lingkungan
 - 600.4.5.1 Bimtek Dampak Lingkungan
 - 600.4.5.2 Penerapan Sistem Kebijakan Dampak Lingkungan
 - 600.4.5.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut
- 600.4.6 Pemantauan dan Pengawasan
 - 600.4.6.1 Manufaktur Prasarana dan Jasa
 - 600.4.6.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
 - 600.4.6.3 AgroIndustri dan Usaha Skala Kecil
 - 600.4.6.4 Udara Sumber Bergerak
- 600.4.7 Evaluasi dan Pengembangan
 - 600.4.7.1 Manufaktur Prasarana dan Jasa
 - 600.4.7.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
 - 600.4.7.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
 - 600.4.7.4 Udara Sumber Bergerak
- 600.4.8 Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan
 - 600.4.8.1 Pengembangan

	600.4.8.2	Pemanfaatan
	600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik
	600.4.8.4	Keamanan Hayati
	600.4.8.5	Pengendalian Kerusakan Lahan
600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	
	600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem
	600.4.9.2	Rawa
600.4.10	Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer	
	600.4.10.1	Perangkat Mitigasi
	600.4.10.1	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
	600.4.10.1	Pengendalian Bahan Perusak Ozon
	600.4.10.1	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim	
	600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Antara lain : Pengembangan Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perubahan Iklim
	600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim
600.4.12	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	
	600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi
	600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
	600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.13	Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	
	600.4.13.1	Pengumpulan dan Pemanfaatan
	600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan
	600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping
	600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas Batas
600.4.14	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Pemulihan Kontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
	600.4.14.1	Pemantauan
	600.4.14.2	Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi
600.4.15	Pengelolaan Sampah	
	600.4.15.1	Pembatasan Sampah
	600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
	600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura
	600.4.15.4	Penetapan Pemenang Adipura
6.4.16	Hukum Administrasi Lingkungan	
	600.4.16.1	Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan
	600.4.16.2	Penataan Hukum Administrasi Lingkungan

- 600.4.17 Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 - 600.4.17.1 Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan
 - 600.4.17.2 Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan
- 600.4.18 Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
 - 600.4.18.1 Penyidikan
 - 600.4.18.2 Koordinasi Penuntutan, Evaluasi dan Tindak Lanjut
 - 600.4.18.3 Koordinasi Pembinaan Penyidik PNS
- 600.4.19 Komunikasi Lingkungan
 - 600.4.19.1 Pengembangan Komunikasi
 - 600.4.19.2 Publikasi dan Kampanye
- 600.4.20 Penguatan Inisiatif Masyarakat
 - 600.4.20.1 Komunikasi Pendidikan Lingkungan
 - 600.4.20.2 Kearifan Lingkungan
- 600.4.21 Peningkatan Peran Masyarakat
 - 600.4.21.1 Masyarakat Perkotaan
 - 600.4.21.2 Masyarakat Pedesaan
- 600.4.22 Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
 - 600.4.22.1 Organisasi Sosial Masyarakat
 - 600.4.22.2 Organisasi Profesi Dunia Usaha
- 600.4.23 Data dan Informasi Lingkungan
 - 600.4.23.1 Pengelolaan Data
 - 600.4.23.2 Pengelolaan Informasi
 - 600.4.23.3 Pengembangan Perangkat Lunak
 - 600.4.23.4 Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
- 600.4.24 Kelembagaan Lingkungan
 - 600.4.24.1 Kelembagaan dan tata Laksana
 - 600.4.24.2 Fasilitas Standar Pelayanan Minimal
- 600.4.25 Standarisasi dan Teknologi
 - 600.4.25.1 Standarisasi Manajemen dan Pengujian Lingkungan
 - 600.4.25.2 Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
 - 600.4.25.3 Teknologi Ramah Lingkungan
- 600.4.26 Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan
 - 600.4.26.1 Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan
 - 600.4.26.2 Laboratorium Rujukan dan Pengujian

700. PENGAWASAN

700.1 PENGAWASAN INTERNAL

- 700.1.1 Rencana Pengawasan
 - 700.1.1.1 Rencana Strategis Pengawasan
 - 700.1.1.2 Rencana Kerja Pengawasan Tahunan
 - 700.1.1.3 Rencana Kinerja Tahunan
 - 700.1.1.4 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
 - 700.1.1.5 Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
- 700.1.2 Pelaksanaan Pengawasan
 - 700.1.2.1 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan Tindak Lanjut (TL)
 - 700.1.2.2 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan Tindak Lanjut
 - 700.1.2.3 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan Tindak Lanjut
 - 700.1.2.4 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
 - 700.1.2.5 Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
 - 700.1.2.6 Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
 - 700.1.2.7 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
 - 700.1.2.8 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
 - 700.1.2.9 Good Corporate Governance (GCG)

800. KEPEGAWAIAN

800.1 SUMBER DAYA MANUSIA

- 800.1.1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
 - 800.1.1.1 Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara, Antara lain : Bahan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan
 - 800.1.1.2 Perencanaan Pertimbangan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara, Antara lain : Pertimbangan Teknis Penetapan Formasi ASN, Pertimbangan Teknis Penetapan Formasi Ikatan Dinas
 - 800.1.1.3 Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
 - 800.1.1.4 Standarisasi Jabatan, Antara lain : Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan
- 800.1.2 Formasi dan Pengadaan Pegawai
 - 800.1.2.1 Formasi ASN, Antara lain : Usulan Formasi, Usulan Permintaan Formasi Kepada Manpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus
 - 800.1.2.2 Proses Rekrutmen / Pengadaan ASN, Antara lain : Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN
 - 800.1.2.3 Pengumuman Kelulusan ASN
 - 800.1.2.4 Berkas Lamaran yang Tidak Diterima
 - 800.1.2.5 Pengangkatan ASN
 - 800.1.2.6 Open Bidding (seleksi terbuka jabatan)
 - 800.1.2.7 Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
 - 800.1.2.8 Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
- 800.1.3 Mutasi Pegawai
 - 800.1.3.1 Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi Antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Peminangan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
 - 800.1.3.2 Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
 - 800.1.3.3 Pengangkatan dan Perberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
 - 800.1.3.4 Perubahan Data Dasar / Status/ Kedudukan Hukum Pegawai
 - 800.1.3.5 Peninjauan Masa Kerja
 - 800.1.3.6 Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)

- 800.1.4 Pengembangan Karir
 - 800.1.4.1 Usulan Tugas Belajar/ Izin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi Lain/ Pertukaran antar ASN dengan Pegawai Swasta
 - 800.1.4.2 Penyesuaian Ijazah
 - 800.1.4.3 Penyusunan Sistem Karier
 - 800.1.4.4 Standar Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
 - 800.1.4.5 Angka Kredit, Antara lain : Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit
- 800.1.5 Kinerja Aparatur Sipil Negara
 - 800.1.5.1 Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
 - 800.1.5.2 Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
 - 800.1.5.3 Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
- 800.1.6 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
 - 800.1.6.1 Kode Etik Pegawai
 - 800.1.6.2 Disiplin
 - 800.1.6.3 Pemberhentian Dengan Hormat
 - 800.1.6.4 Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
 - 800.1.6.5 Pemberhentian Sementara
 - 800.1.6.6 Pensiun ASN, Antara lain : Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Dudanya
- 800.1.7 Bantuan Hukum
- 800.1.8 Status dan Kedudukan Pegawai
 - 800.1.8.1 Status Kepegawaian
 - 800.1.8.2 Kedudukan Kepegawaian
 - 800.1.8.3 Keberatan Pegawai
 - 800.1.8.4 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
- 800.1.9 Sistem Informasi Kepegawaian
 - 800.1.9.1 Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
 - 800.1.9.2 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 800.1.9.3 Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik
 - 800.1.9.4 Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
- 800.1.10 Pengawasan dan Pengendalian
 - 800.1.10.1 Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
 - 800.1.10.2 Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan Kesejahteraan dan Kinerja
800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
800.1.11	Administrasi Pegawai
800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
800.1.11.2	Cuti Sakit
800.1.11.3	Cuti Bersalin
800.1.11.4	Cuti Tahunan
800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
800.1.11.6	Cuti Besar
800.1.11.7	Cuti Di Luar Tanggungan Negara
800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan
800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/Tunjangan
800.1.12	Kesejahteraan Pegawai
800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS
800.1.12.3	Tabungan Perumahan
800.1.12.4	Bantuan Sosial
800.1.12.5	Pakaian Dinas
800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih
800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi
800.1.12.10	Rekam Medis
800.1.13	Administrasi Perseorangan
800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
800.1.13.3	Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya yang disetarakan
800.1.13.4	Sekretaris Daerah
800.1.13.5	ASN Berjasa/Terlibat dalam Peristiwa Berskala Nasional
800.1.14	Penilaian Kompetensi
800.1.14.1	Penilaian Kompetensi
800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi

800.2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- 800.2.1 Kebijakan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 800.2.2 Pendidikan dan Pelatihan
 - 800.2.2.1 Sistem Informasi Program dan Pembinaan Diklat
 - 800.2.2.2 Pedoman-pedoman Kediklatan
 - 800.2.2.3 Kurikulum-kurikulum Diklat
 - 800.2.2.4 Modul-modul Diklat
 - 800.2.2.5 Panduan Fasilitator
 - 800.2.2.6 Saran / Rekomendasi Penyelenggaraan Diklat
 - 800.2.2.7 Notulen Sosialisasi / Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
 - 800.2.2.8 Monitoring dan Evaluasi Program dan Pembinaan Diklat
 - 800.2.2.9 Konsultasi, Advokasi, Asisten Diklat
- 800.2.3 Widyaiswara
 - 800.2.3.1 Seleksi dan Pengembangan Widyaiswara
 - 800.2.3.2 Sertifikasi Widyaiswara
 - 800.2.3.3 Monitoring dan Evaluasi Widyaiswara
 - 800.2.3.4 Penilaian Widyaiswara
 - 800.2.3.5 Konsultasi, Advokasi dan Asistensi Widyaiswara
 - 800.2.3.6 Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
- 800.2.4 Penyelenggaraan Diklat
 - 800.2.4.1 Perencanaan; Peserta, Pengajar, Penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
 - 800.2.4.2 Penyelenggaraan Diklat
 - 800.2.4.3 Konsultasi, Advokasi dan Asistensi Penyelenggaraan Diklat
 - 800.2.4.4 Pengembangan Bahan Ajar dan Metodologi Pembelajaran
 - 800.2.4.5 Sistem Informasi Diklat
 - 800.2.4.6 Monitoring Penyelenggara Diklat
 - 800.2.4.7 Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat
- 800.2.5 Alumni

900. KEUANGAN

900.1 KEUANGAN DAERAH

- 900.1.1 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
 - 900.1.1.1 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
 - 900.1.1.2 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
 - 900.1.1.3 Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
 - 900.1.1.4 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
- 900.1.2 Penyusunan Anggaran
 - 900.1.2.1 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan
 - 900.1.2.2 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
 - 900.1.2.3 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
 - 900.1.2.4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
- 900.1.3 Pelaksanaan Anggaran
 - 900.1.3.1 Surat Penyedia Dana (SPP< SPM dan SP2D) : UP, GU, TU, LS
 - 900.1.3.2 Pendapatan
 - 900.1.3.3 Belanja
 - 900.1.3.4 Pembiayaan Daerah
 - 900.1.3.5 Dokumen Penatausahaan Keuangan
 - 900.1.3.6 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
 - 900.1.3.7 Daftar Gaji
 - 900.1.3.8 Kartu Gaji
 - 900.1.3.9 Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
 - 900.1.3.10 Laporan Keuangan
- 900.1.4 Pinjaman/Hibah Luar Negeri
 - 900.1.4.1 Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
 - 900.1.4.2 Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)
 - 900.1.4.3 Dokumen Memorandum of Understanding (MoU) dan Dokumen sejenis
 - 900.1.4.4 Dokumen Loan Agreemeent (PHLN) Antara lain : Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender

900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, Antara lain : Usulan Luncuran Dana
900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut Lampirannya
900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu : Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta Lampirannya, al : SPP, Kontrak, BA dan data Pendukung lainnya
900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi Antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification Of Contract, Withdrawal Authorization (WA)
900.1.4.10	Staff Appraisal Report
900.1.4.11	Report/ Laporan
900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah
900.1.4.13	Completion Report/Annual Report
900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)
900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi
900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulan/Semesteran
900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan
900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan
900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) danm lampirannya : SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, Bilyet Giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
900.1.7.3	Buku Rekening Bank
900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening

- 900.1.7.5 Pembukuan Anggaran terdiri, Antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP) dan Rekening Koran
- 900.1.8 Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan
- 900.1.8.1 Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaa dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran Lainnya
- 900.1.8.2 Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan
- 900.1.9 Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD meliputi : Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD
- 900.1.10 Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu
- 900.1.10.1 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu
- 900.1.10.2 Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada dan Pemilu
- 900.1.10.3 Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro, Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank
- 900.1.10.4 Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya

- 900.1.11 Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah
 - 900.1.11.1 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
 - 900.1.11.2 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
 - 900.1.11.3 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
 - 900.1.11.4 Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah

- 900.1.12 Anggaran Daerah
 - 900.1.12.1 Anggaran Daerah
 - 900.1.12.2 Dukungan Teknis Anggaran Daerah

- 900.1.13 Pendapatan dan Investasi Daerah
 - 900.1.13.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Antara lain : Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Standardisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyiapan Bahan Perumusan Bimbingan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyiapan Bahan Perumusan Analisis dan Evaluasi, Pemantauan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyiapan bahan Perumusan Kebijakan Fasilitasi Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - 900.1.13.2 Badan Usaha Milik Daerah, Antara lain : Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan, Fasilitas serta Bimbingan Teknis di Bidang Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Non Keuangan, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
 - 900.1.13.3 Badan Layanan Umum Daerah, Antara lain : Analisis, Standardisasi Teknis, Fasilitasi serta Bimbingan Teknis, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan, Standarisasi Teknis, Prosedur dan Kriteria, Fasilitasi serta Bimbingan Teknis Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah
 - 900.1.13.4 Pengelolaan Kekayaan Daerah, Antara lain : Fasilitasi serta Bimbingan Teknis Pengelolaan Kekayaan, Fasilitasi serta Bimbingan Teknis Investasi Daerah, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kekayaan dan Investasi Daerah

- 900.1.13.5 Pinjaman dan Obligasi Daerah, Antara lain : Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Obligasi Daerah, Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan dana Bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan Teknis Obligasi Daerah, Dana Bergulir serta Penyertaan Modal daerah, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah, Obligasi Daerah, Dana Bergulir dan Penyertaan Modal Daerah
- 900.1.14 Fasilitasi Dana Perimbangan
- 900.1.14.1 Fasilitasi Dana Alokasi Umum, Antara lain : Koordinasi Penyiapan Data Dasar Perhitungan dan Rekonsiliasi Dana Alokasi Umum, Sosialisasi dan Supervisi Dana Alokasi Umum, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Umum
- 900.1.14.2 Fasilitasi Dana Alokasi Khusus, Antara lain : Koordinasi Penyiapan Data Dasar, Sosialisasi dan Supervisi Dana Alokasi Khusus, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dana Alokasi Khusus
- 900.1.14.3 Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Antara lain : Koordinasi Penyiapan Data Dasar Perhitungan dan Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Sosialisasi dan Supervisi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam
- 900.1.14.4 Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya, Antara lain: Sosialisasi dan Supervisi Dana Otonomi Khusus, Sosialisasi dan Supervisi dan Transfer Lainnya, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya
- 900.1.14.5 Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan, Antara lain : Penyiapan Sinkronisasi Kebijakan dan Perimbangan, Penyiapan Dukungan Teknis Dana Perimbangan, Penyiapan Data dan Informasi untuk Penyusunan Laporan Dana Perimbangan
- 900.1.15 Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

- 900.1.15.1 Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Antara lain : Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- 900.1.15.2 Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Antara lain : Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- 900.1.15.3 Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Antara lain : Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- 900.1.15.4 Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli, Antara lain : Penyiapan Bahan Bantuan Keterangan Ahli di Bidang Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- 900.1.15.5 Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Antara lain : Penyiapan Sinkronisasi Kebijakan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah, Penyiapan Data dan Informasi untuk Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 5 Juni

2023

 **BUPATI LIMA PULUH KOTA** 

 **SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

12/23
**TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM**